

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Rencana Strategis (Renstra) Kabupaten Siak merupakan dokumen perencanaan taktis strategis yang menjabarkan potret permasalahan pembangunan daerah serta indikasi daftar program dan kegiatan yang akan dilaksanakan guna memecahkan masalah secara terencana dan bertahap melalui sumber pembiayaan APBD setempat, dengan mengutamakan kewenangan wajib sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, telah memberikan kewenangan otonomi kepada setiap daerah secara luas, nyata dan bertanggung jawab. Dalam undang-undang ini, daerah mempunyai kewenangan untuk menyelenggarakan persoalan-persoalan pembiayaan, perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi hasil pembangunan sesuai dengan standar, norma dan kebijakan Pemerintah kecuali kewenangan di bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal serta agama. Daerah juga mendapat kewenangan untuk menyelenggarakan perizinan usaha baik bagi investor dalam negeri maupun investor asing serta dapat pula melakukan pinjaman dalam negeri dan pinjaman luar negeri.

Dalam Pasal 11 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, Daerah Kabupaten/Kota mempunyai kewenangan penuh dalam penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut bidang pekerjaan umum, kesehatan, pendidikan, industri dan perdagangan, penanaman modal, lingkungan hidup, pertanian, koperasi, dan tenaga kerja dengan tujuan untuk mendorong pemberdayaan masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan peran serta masyarakat serta pengembangan peran dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Selanjutnya dalam Pasal 78 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 ditegaskan bahwa seluruh kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan tugas pemerintahan tersebut dibiayai dan atas beban APBD. Hal ini berarti bahwa setiap daerah Kabupaten dan kota harus mampu menggali sumber keuangan sendiri secara optimal sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh setiap daerah, yang didukung oleh perimbangan keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah.

Di lain pihak, seluruh lapisan masyarakat yang ada di daerah berharap kondisi kehidupan mereka menjadi lebih baik, seiring dengan diberlakukannya Undang-undang yang mengatur tentang Otonomi Daerah. Oleh karena itu setiap penyelenggaraan kegiatan yang berkaitan dengan kewenangan daerah harus melibatkan seluruh unsur masyarakat, karena pada dasarnya pembangunan dilaksanakan dari, oleh dan untuk seluruh masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan. Dengan kata lain bahwa masyarakat harus diberdayakan melalui peran aktifnya dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan monitoring kegiatan pembangunan di daerah.

Bagi Kabupaten Siak sebagai Kabupaten yang baru selain menghadapi tugas dan tanggung jawab sesuai dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tersebut, maka permasalahan obyektif dalam mengagendakan program dan kegiatan pembangunan daerah adalah kondisi geografis dan keadaan alam yang spesifik, yang belum seluruhnya tersentuh oleh kegiatan pembangunan masa sebelumnya.

B. TUJUAN DAN SASARAN PENYUSUNAN RENSTRA

1. Tujuan Umum

Kegiatan penyusunan rencana strategis (Renstra) ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja kelembagaan daerah dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Siak dalam kurun waktu lima tahun ke depan (2002–2006), sehingga dapat mempercepat proses peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Siak dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Tujuan Khusus

Secara khusus, tujuan yang ingin dicapai dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kabupaten Siak ini adalah :

- (1) Untuk menjaga konsistensi perencanaan dan pemilihan program dan kegiatan prioritas sehingga pembangunan dapat mengarah pada tujuan yang telah ditetapkan dan pada pencapaian visi;
- (2) Untuk menjamin komitmen bersama masyarakat Kabupaten Siak terhadap program dan kegiatan yang telah disepakati oleh semua *stakeholders* pembangunan daerah;
- (3) Untuk memperkuat landasan penentuan program dan kegiatan tahunan daerah Kabupaten Siak selama lima tahun yang akan datang.;
- (4) Untuk mengoptimalkan kapasitas daerah dalam rangka pemberdayaan masyarakat;
- (5) Sebagai alat ukur kinerja Pemerintah Kabupaten Siak.

3. Sasaran

Sasaran dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kabupaten Siak ini adalah :

- (1) Tersusunnya dokumen perencanaan taktis strategis sebagai alat bantu yang terukur bagi rujukan penilaian kinerja Pemerintah Daerah;
- (2) Terencananya pembangunan yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan dengan tahapan yang jelas;
- (3) Terencananya sistem manajemen pembangunan dengan prinsip profesionalitas dan akuntabilitas.

C. LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN RENSTRA

Renstra ini merupakan dokumen perencanaan taktis strategis untuk menjabarkan potret permasalahan pembangunan Daerah Kabupaten Siak seperti yang telah dituangkan dalam indikasi daftar program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk memecahkan permasalahan tersebut secara bertahap melalui sumber pembiayaan APBD. Oleh karenanya, landasan penyusunan Renstra Kabupaten Siak Tahun 2002-2006 ini adalah sebagai berikut :

- 1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
 - 3) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah dan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
 - 4) Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
 - 5) Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah;
 - 6) Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/1240/II/Bangda tanggal 21 Juni 2001 perihal Pedoman Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Propinsi, Kabupaten dan Kota;
-

- 7) Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Siak Tahun 2002-2006.

D. SISTEMATIKA PENYUSUNAN RENSTRA

Untuk menguraikan program dan kegiatan pembangunan yang didanai oleh sumber APBD Kabupaten Siak selama kurun waktu 5 tahun sebagaimana dimuat dalam Rencana Strategis Kabupaten Siak, kerangka penyusunan mengikuti sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Tujuan dan Sasaran Penyusunan Renstra
- C. Landasan Hukum Penyusunan Renstra
- D. Sistematika Penyusunan Renstra

BAB II GAMBARAN UMUM KABUPATEN SIAK

- A. Keadaan Geografis
- B. Keadaan Demografi
- C. Gambaran Perekonomian Daerah
- D. Permasalahan dan Kendala yang Dihadapi

BAB III VISI, MISI, DAN NILAI

- A. Visi Pembangunan Kabupaten Siak
- B. Misi Pembangunan Kabupaten Siak
- C. Nilai (Value)

BAB IV ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS DAN FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN

- A. Analisis Lingkungan Strategis
- B. Faktor Penentu Keberhasilan

BAB V TUJUAN DAN SASARAN

- A. Tujuan
- B. Sasaran

BAB VI STRATEGI PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN

- A. Kebijakan, Program dan Kegiatan Prioritas Pelaksanaan Misi Pertama
- B. Kebijakan, Program dan Kegiatan Prioritas Pelaksanaan Misi Kedua
- C. Kebijakan, Program dan Kegiatan Prioritas Pelaksanaan Misi Ketiga
- D. Kebijakan, Program dan Kegiatan Prioritas Pelaksanaan Misi Keempat

BAB VII PENGUKURAN DAN EVALUASI KINERJA

- A. Kerangka Pengukuran Kinerja
- B. Evaluasi Kinerja
- C. Kesimpulan Hasil Evaluasi Kinerja
- D. Analisis Pencapaian Akuntabilitas Kinerja

BAB VIII MATRIKS INDIKASI PROGRAM DAN KEGIATAN DAERAH

BAB IX PENUTUP

BAB II GAMBARAN UMUM KABUPATEN SIAK

A. KEADAAN GEOGRAFIS

Kabupaten Siak terletak diantara 1°16'30" LU sampai dengan 0°20'49" dan 100°54'21" BT sampai dengan 102°10'59" BT, dengan luas wilayah mencapai 8.556,09 Km².

Kabupaten Siak mempunyai batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Bengkalis;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kota Pekanbaru dan Kabupaten Pelalawan;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Bengkalis, Kampar, Rokan Hulu, dan Kota Pekanbaru;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Bengkalis dan Pelalawan.

Kabupaten Siak sebagian terdiri dari dataran rendah di bagian timur dan sebagian dataran tinggi di sebelah barat, beriklim tropis dengan suhu berkisar antara 25° - 32° Celcius. Jenis tanah pada umumnya terdiri dari tanah podsolik merah kuning dari batuan dan alluvial serta tanah organosol dan gley humus dalam bentuk rawa-rawa atau tanah basah.

Selain terkenal dengan Sungai Siak yang membelah wilayah Kabupaten Siak, juga terdapat banyak tasik atau danau yang tersebar di beberapa wilayah Kecamatan, yang apabila dikembangkan dengan serius dalam suatu sistem yang berkesinambungan akan menjadi obyek wisata yang menarik.

B. KEADAAN DEMOGRAFI

1. Data Penduduk Kabupaten Siak

Penduduk Kabupaten Siak berdasarkan hasil registrasi penduduk tahun 2002 berjumlah 270.074 jiwa.

Tabel 1 : Penduduk Per Kecamatan di Kabupaten Siak Tahun 2002

Kecamatan	Jumlah
1. Minas	17.179
2. Siak	22.879
3. Sungai Apit	31.017
4. Sungai Mandau	3.969
5. Kerinci Kanan	17.182
6. Tualang	75.285
7. Dayun	21.317
8. Bunga Raya	18.445
9. Kandis	34.244
10. Lubuk Dalam	13.124
11. Koto Gasib	15.433
Jumlah seluruhnya	270.074

Sumber : BPS Kabupaten Siak

2. Tingkat Kepadatan dan Laju Pertumbuhan Penduduk

Tingkat kepadatan penduduk di Kabupaten Siak tahun 2002 sangat bervariasi. Kecamatan Tualang adalah yang terpadat penduduknya yaitu mencapai 219,10 jiwa/Km², sedangkan yang terjarang adalah Kecamatan Mandau yaitu hanya berjumlah 2,33 jiwa/Km². Sedangkan tingkat kepadatan penduduk rata-rata di Kabupaten Siak adalah 31,56 jiwa/Km².

Tabel 2 : Luas Wilayah, Penduduk dan kepadatan Penduduk di Kabupaten Siak Tahun 2002

Kecamatan	Penduduk		Kepadatan Penduduk per-Km ²
	Luas (Km ²)	Jumlah Penduduk	
1. Minas	346,35	17.179	49,60
2. Siak	1.331,62	22.879	17,18
3. Sungai Apit	1.419,71	31.017	21,84
4. Sungai Mandau	1.705,00	3.969	2,33
5. Kerinci Kanan	128,66	17.182	133,54
6. Tualang	343,60	75.285	219,10
7. Dayun	232,24	21.317	91,79
8. Bunga Raya	695,47	18.445	26,52
9. Kandis	1.493,65	34.244	22,93
10. Lubuk Dalam	155,09	13.124	84,62
11. Koto Gasib	704,70	15.433	21,90
Jumlah seluruhnya	8556,09	270.074	31,56

Sumber : Data hasil olahan

Laju Pertumbuhan Penduduk Di Kabupaten Siak Pada Kurun Waktu Antara 1990 - 2000 Rata-Rata Sebesar 6,35% Pertahun. Pertumbuhan Pada Masing-Masing Daerah Kecamatan Pada Kurun Waktu Yang Sama Sangat Bervariasi.

3. Penduduk Menurut Lapangan Pekerjaan

Pasar kerja pada umumnya menunjukkan bahwa jumlah tenaga kerja selalu lebih besar dari lapangan kerja yang tersedia, sehingga menimbulkan adanya tingkat pengangguran. Selain itu terdapatnya ketidaksesuaian antara tingkat pendidikan/keterampilan yang dimiliki tenaga kerja dengan formasi pekerjaan yang tersedia (dunia usaha), sehingga menjadi permasalahan yang menimbulkan dampak pada perekonomian secara makro.

Tabel 3 : Penduduk 10 Tahun Keatas Menurut Lapangan Usaha Utama Kabupaten Siak Tahun 2001

No.	Lapangan Usaha	Penduduk Berumur 10 tahun ke atas
1.	Pertanian	121.851
2.	Pertambangan dan Penggalian	3.322
3.	Industri	48.541
4.	Listrik, Gas dan Air Minum	41
5.	Konstruksi	2.950
6.	Perdagangan	11.545
7.	Transportasi	4.838
8.	Keuangan	248
9.	Jasa-jasa	3.344
	Jumlah Penduduk	196.682

Sumber : BPS Kabupaten Siak

4. Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

Berhasil atau tidaknya pembangunan suatu bangsa banyak dipengaruhi oleh tingkat pendidikan penduduknya. Semakin maju pendidikan berarti akan membawa berbagai pengaruh positif bagi masa depan berbagai bidang kehidupan. Sumber Daya Manusia yang berkualitas tentu dihasilkan oleh proses pendidikan yang berkualitas pula. Upaya memperbaiki tingkat pendidikan adalah masalah prinsip dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena dengan membaiknya tingkat pendidikan setiap orang mempunyai kesempatan untuk meningkatkan peran serta dan kemampuannya dalam pelaksanaan pembangunan nasional.

Tabel 4 : Penduduk Berumur 10 Tahun ke-atas menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Jenis Kelamin, di Kabupaten Siak Tahun 2001

Pendidikan Yang Ditamatkan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1. Tidak/belum tamat SD	24.195	30.328	54.523
2. Sekolah Dasar	30.216	28.432	58.648
3. SMTP	21.965	24.864	46.829
4. SMU	22.521	12.377	34.898
5. Diploma I/II	112	111	223
6. Diploma III	558	334	892
7. Universitas/D IV	558	111	668
Jumlah	100.125	96.557	196.682

Sumber : Siak Dalam Angka 2001

Data pada tabel di atas menunjukkan bahwa penduduk perempuan yang tidak/belum tamat SD lebih besar persentasenya dibandingkan laki-laki, dan semakin tinggi jenjang pendidikan menunjukkan kecenderungan persentase penduduk perempuan yang menamatkan sekolah lebih kecil dari pada penduduk laki laki.

Distribusi jenjang pendidikan formal pada penduduk berumur 10 tahun ke atas merupakan salah satu indikator guna mengetahui kualitas sumber daya manusia di wilayah Kabupaten Siak. Berdasarkan jenjang pendidikan formal tersebut diketahui penduduk yang tidak menamatkan pendidikan dasar sebesar 27,72 %, penduduk dengan tingkat pendidikan dasar sebesar 29,82 %, penduduk dengan tingkat pendidikan menengah pertama 23,81 %, penduduk dengan tingkat pendidikan menengah atas 17,74 %, sedangkan penduduk dengan tingkat pendidikan perguruan tinggi sebesar 0,91 %. Tingginya angka penduduk yang berpendidikan sekolah menengah merupakan refleksi bahwa sebagian besar penduduk yang tamat sekolah menengah tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

Bertolak dari data distribusi jenjang pendidikan formal, diketahui bahwa sebesar 17,74% angkatan kerja berada pada jenjang pendidikan sekolah menengah atas, hal ini dapat diartikan bahwa angkatan kerja di Kabupaten Siak kurang memadai untuk menerima dan mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Selanjutnya sesuai hasil Susenas 2001, dari jumlah penduduk berumur 10 tahun ke atas sebanyak 196.682 jiwa di antaranya sebanyak 106.703 orang termasuk sebagai angkatan kerja atau sebesar 54,25 %. Selanjutnya dari jumlah angkatan kerja diketahui angkatan kerja yang sedang berkerja sejumlah 104.362 orang atau sebesar 97,81 %, dan yang sedang mencari kerja sebanyak 2.341 orang atau sebesar 2,19 %.

5. Desa dan Penduduk Miskin

Penduduk miskin dapat di definisikan sebagai penduduk yang serba kekurangan. Kurang mampu memenuhi kebutuhan pangan, sandang, pendidikan, kesehatan, dan perumahan.

Penduduk miskin biasanya bertempat tinggal di daerah yang prasarana, sarana serta fasilitas-fasilitas untuk mendorong tingkat produktivitas adalah serba kurang atau tidak ada.

Di Kabupaten Siak pada tahun 2001 masih terdapat 24,54 % desa miskin dan terisolir, dan berdasarkan perhitungan BPS estimasi jumlah penduduk miskinnya sebesar 23.500 jiwa atau mencapai 8,98 % dari jumlah penduduk.

Tabel 5 : Desa Miskin Menurut Kecamatan Di Kabupaten Siak, Tahun 2001

Kecamatan	Jumlah Desa/Kelurahan	Jumlah Desa Miskin
1. Minas	5	-
2. Siak	12	3
3. Sungai Apit	18	5
4. Sungai Mandau	9	6
5. Kerinci Kanan	12	-
6. Tualang	8	1
7. Dayun	11	-
8. Bunga Raya	14	7
9. Koto Gasib	9	5
10. Kandis	6	-
11. Lubuk Dalam	6	-
Jumlah	110	27

Sumber : BPS Kabupaten Siak

Berdasarkan tabel tersebut di atas, dapat tergambar bahwa tingkat kesejahteraan penduduk di Kabupaten Siak perlu mendapatkan perhatian yang sangat serius.

C. GAMBARAN PEREKONOMIAN DAERAH

1. Perkembangan Ekonomi

Perkembangan perekonomian suatu daerah antara lain dapat dilihat dari struktur PDRB, pertumbuhan PDRB dan tingkat pertumbuhan ekonomi menurut lapangan usaha.

Selama periode 1999-2001 perekonomian Kabupaten Siak didominasi oleh sektor industri pengolahan dan sektor pertanian (Tabel 6). Sektor industri pengolahan masih sangat strategis karena rata-rata kontribusinya sekitar 48,75 % terhadap perekonomian Kabupaten Siak. Sedangkan sektor pertanian memberikan kontribusi secara rata-rata sekitar 29,69 %. Bila besarnya kontribusi tersebut disatukan akan mengindikasikan tentang posisi potensi perekonomian di Kabupaten Siak sebenarnya dikuasai oleh kedua sektor tersebut, yaitu rata-rata sekitar 78,44 %. Namun demikian dari sisi struktur perekonomian, fakta ini menunjukkan fundamental perekonomian Kabupaten Siak belum baik, karena struktur yang demikian kurang kuat atau labil. Perekonomian menjadi sangat bergantung pada kondisi global. Oleh karena itu Kabupaten Siak berkewajiban mendorong pertumbuhan berbagai sektor usaha secara lebih proporsional.

Tabel 6 : Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Siak Menurut Lapangan Usaha, tahun 1999-2001

Lapangan Usaha	1999	2000	2001
1. Pertanian	12,20	11,58	5,31
2. Pertambangan dan Penggalian	9,59	5,32	7,93
3. Industri Pengolahan	0,42	8,83	8,02
4. Listrik dan Air Minum	13,28	1,45	2,73
5. Bangunan	3,96	5,73	10,24
6. Perdagangan, Hotel dan Restoran	3,15	4,94	5,69
7. Angkutan dan Komunikasi	12,57	6,14	5,70
8. Keuangan	-2,63	2,22	3,16
9. Jasa-jasa	5,58	2,05	3,81
Siak	3,82	8,60	6,81
Riau	4,16	10,25	5,05

Sumber : Pendapatan Regional Siak 1999-2001

Dari tabel memperlihatkan sektor ekonomi yang tumbuh drastis pada tahun 2001 adalah sektor Bangunan, yang meningkat tajam mencapai angka 10,24 %. Ini menggambarkan bahwa pada tahun 2001 kebijakan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Siak berpengaruh positif terhadap sektor bangunan. Selanjutnya secara berurutan sektor yang memiliki laju pertumbuhan di atas laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Siak adalah sektor industri pengolahan, serta sektor pertambangan dan penggalian dengan laju pertumbuhan masing-masing sebesar 8,02 % dan 7,93 %.

Pada tahun 2001 hanya sektor pertanian yang laju pertumbuhannya lebih rendah bila dibandingkan dengan keadaan tahun-tahun sebelumnya. Sektor ini pada tahun 2000 sempat mencatat laju pertumbuhan tertinggi hingga mencapai 11,58 %. Bila diamati secara seksama, rendahnya pertumbuhan sektor pertanian ini ternyata sangat berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi PDRB Kabupaten Siak. Hal ini merupakan suatu indikator bahwa roda perekonomian Kabupaten Siak juga sangat dipengaruhi oleh sektor pertanian.

Gambaran tentang kestabilan tingkat pertumbuhan ekonomi dan distribusi prosentase PDRB di Kabupaten Siak tampak sebagai mana dalam tabel berikut.

Tabel 7 : Perkembangan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan 1993 di Kabupaten Siak, Periode 1998–2001

TAHUN	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku		PDRB Atas Dasar Harga Konstan 1993	
	Jumlah (Jutaan Rp)	Δ %	Jumlah (Jutaan Rp)	Δ %
1998	632.127,27	-	402.405,74	-
1999	765.862,90	21,16	417.786,89	3,82
2000	909.900,88	18,81	453.695,99	8,60
2001	1.057.687,22	16,24	484.591,46	6,81

Tabel 8 : Distribusi Prosentase PDRB Kabupaten Siak Menurut Lapangan Usaha, tahun 1999-2001

Lapangan Usaha	1999	2000	2001
1. Pertanian	28,10	29,94	31,04
2. Pertambangan dan Penggalian	1,56	1,41	1,51
3. Industri Pengolahan	51,61	48,27	46,37
4. Listrik dan Air Minum	0,16	0,14	0,14
5. Bangunan	1,09	1,00	1,10
6. Perdagangan, Hotel dan Restoran	7,20	7,95	8,25
7. Angkutan dan Komunikasi	2,08	2,10	2,19
8. Keuangan	2,34	2,44	2,52
9. Jasa-jasa	5,85	6,76	6,88
Jumlah	100	100	100

Sumber : Pendapatan Regional Siak 1999-2001

Sektor industri pengolahan dengan kontribusi terbesar selama periode 1999-2001 mempunyai kecenderungan yang terus menurun. Apabila kontribusi pada tahun 1999 mencapai angka 51,61 %, maka pada tahun 2000 menurun menjadi 48,27 % dan akhirnya tahun 2001 menjadi hanya 46,37 %. Kecenderungan ini lebih disebabkan oleh kontribusi sub sektor industri besar dan sedang yang terus mengecil sejak tahun 1999 hingga tahun 2001, yaitu dari 50,93 % di tahun 1999 menjadi 47,63 % pada tahun 2000 dan terakhir menjadi 45,75 % di tahun 2001.

Selanjutnya kontribusi sektor pertanian juga memberikan peranan yang sangat besar. Apabila arah kontribusi dari sektor industri pengolahan cenderung turun, maka sebaliknya yang terjadi di sektor pertanian terus mengalami peningkatan. Tercatat pada tahun 1999 kontribusi sektor pertanian sebesar 28,10 %, semakin meningkat ditahun 2000 menjadi 29,94 % dan akhirnya di tahun 2001 semakin meningkat lagi menjadi 31,04%. Peningkatan kontribusi oleh sektor pertanian ini terutama didukung oleh sub sektor perkebunan yang terus mengalami peningkatan sejak tahun 1999 sampai tahun 2001. Namun kontribusi ini juga sekaligus menunjukkan betapa laju aliran bahan mentah (*raw material*) terekspose ke luar, sehingga masyarakat kurang dapat menikmati nilai tambah produk-produk pertanian.

Beberapa sektor lainnya seperti sektor listrik dan air minum, bangunan, pertambangan, angkutan dan komunikasi, serta sektor keuangan memberikan kontribusi rata-rata di bawah 3 %. Sektor listrik dan air minum selama periode 1999-2000 memiliki kontribusi yang paling kecil, sehingga perlu dipacu lebih kuat untuk dapat menunjang sarana utilitas yang memadai di Kabupaten Siak yang memang sangat diperlukan dalam menunjang aktivitas ekonomi.

Mencermati kondisi empirik angka pertumbuhan perekonomian Kabupaten Siak selama kurun waktu 3 tahun sejak tahun 1999 sampai dengan 2001 (Tabel 7) dapat dinyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi wilayah ini relatif fluktuatif.

Untuk lebih jelasnya hasil prediksi pertumbuhan ekonomi selama rentang waktu 5 tahun dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 9: Prediksi Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Siak Menurut Lapangan Usaha Tahun 2002-2006

No	Lapangan Usaha	2002	2003	2004	2005	2006
1.	Pertanian	4,17	4,86	5,81	6,01	6,44
2.	Pert. & Penggalian	3,25	3,54	4,21	4,56	5,01
3.	Industri Pengolahan	7,93	8,41	7,92	8,01	8,22
4.	Listrik & Air Bersih	3,23	4,42	4,49	4,61	5,52
5.	Bangunan	6,15	6,56	6,98	6,23	6,91
6.	Perdagangan	3,23	3,42	6,25	8,21	8,86
7.	Angkutan	3,88	4,15	4,65	4,01	5,19
8.	Keuangan	3,15	3,41	4,75	5,31	5,35
9.	Jasa-jasa	3,62	4,12	4,62	5,23	5,76
	PDRB	6,21	6,75	7,01	7,24	7,57

Sumber : BPS Kabupaten Siak

Mencermati tampilan data prediksi pertumbuhan ekonomi pada tabel 9 yang ditilik secara agregat maupun disagregat dalam rentang waktu 5 tahun menunjukkan bahwa laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Siak diprediksikan masih relatif bervariasi, hal ini disebabkan masih adanya pengaruh aktivitas perekonomian nasional yang belum pulih.

Dengan laju pertumbuhan ekonomi rata-rata 6,96 % selama rentang waktu lima tahun, dapat diperkirakan nilai PDRB Kabupaten Siak dalam rentang waktu yang sama, dapat sebagaimana tampak pada tabel 10 berikut.

Tabel 10 : Prediksi Nilai PDRB Kabupaten Siak atas Harga Konstan Tahun 1993 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2002-2006

(jutaan rupiah)

Lapangan Usaha	2002	2003	2004	2005	2006
1. Pertanian	124.658,59	130.717,00	138.311,66	146.624,19	156.066,79
2. Pertambangan dan Penggalian	6.647,45	6.882,77	7.172,54	7.499,60	7.875,33
3. Industri Pengolahan	300.362,37	325.622,84	351.412,17	379.560,29	410.760,14
4. Listrik & Air Minum	701,96	732,99	765,90	801,21	845,44
5. Bangunan	3.582,04	3.817,02	4.083,45	4.337,85	4.637,60
6. Perdagangan	33.792,34	34.948,04	37.132,29	40.180,85	43.740,88
7. Angkutan & Komunikasi	11.745,84	12.233,29	12.802,14	13.315,50	14.006,58
8. Keuangan	13.719,49	14.187,32	14.861,22	15.650,35	16.487,64
9. Jasa-jasa	19.474,51	20.284,52	21.399,18	22.537,60	23.816,46
J u m l a h	514.684,59	549.425,80	587.940,55	630.507,45	678.236,85

Sumber : BPS Kabupaten Siak, Prediksi PDRB, 2002

Peranan sektor industri pengolahan sangat penting, bahkan sektor ini sebagai lokomotif dan motor penggerak roda perekonomian Kabupaten Siak. Di samping itu sektor industri pengolahan ini mempunyai peranan yang sangat strategis, karena kontribusinya yang paling dominan terhadap perekonomian Kabupaten Siak.

Fasilitas pendukung akan terus berkembang dengan dibangunnya sejumlah infrastruktur dan fasilitas-fasilitas yang menghubungkan sentra produksi sektor agribisnis dan agroindustri serta industri lainnya, juga mendorong tumbuhnya sejumlah perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha perdagangan, jasa, dan perbankan.

Dalam periode yang sama sektor pertanian merupakan kontributor kedua yang berkembang pesat dan memiliki prospek sangat baik, terutama didukung oleh sub sektor perkebunan. Hal tersebut ditandai dengan berkembangnya berbagai fasilitas pendukung sentra-sentra produksi yang berbasis pada agri-bisnis dan agro-industri. Untuk tidak terperangkap dalam “kesalahan masa lalu” atau pengalaman dalam produksi padi, dimana peningkatan produksi pertanian menyebabkan over production, maka sektor ini perlu didukung oleh pembangunan “sistem” agribisnis yang menjangkau masyarakat pengusaha kecil-menengah. Artinya, pembangunan sub sistem produksi harus diikuti dengan pengolahan, pemasaran dan kelembagaan penunjang seperti sub-sistem informasi pasar, perkreditan dan sebagainya. Selanjutnya dalam rentang waktu yang sama sektor perdagangan merupakan kontributor ketiga dalam pembentukan PDRB.

Aktivitas perekonomian lainnya yang berkembang pesat dan memiliki peluang dalam pembentukan PDRB antara lain pada sektor jasa-jasa dan keuangan khususnya sub sektor perbankan dan moneter, serta sub sektor jasa penunjang lainnya.

Guna mendukung perkembangan sektor industri pengolahan berskala besar dan menengah telah dipersiapkan lahan seluas ± 5.000 hektar terletak di daerah Tanjung Buton yang diperuntukkan bagi pengembangan kawasan industri dan pelabuhan.

2. Pertanian

Pertanian merupakan sektor usaha yang utama bagi penduduk, karena sebagian besar tenaga kerja, yaitu sebesar 61,95 % berada di sektor ini. Pada tahun 2001 kontribusi sektor pertanian terhadap perekonomian Kabupaten Siak adalah sebesar 31,04 %, perannya dalam pembentukan PDRB dari tahun ke tahun semakin meningkat. Sektor pertanian terdiri dari sub sektor pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan dan

perikanan, serta sub sektor kehutanan. Diantara keempat sektor ini, sub sektor perkebunan dan sub sektor kehutanan merupakan primadona di sektor pertanian . Sedangkan sub sektor peternakan dan perikanan adalah yang terkecil di dalam kontribusinya, yaitu pada tahun 2001 hanya sebesar 0,63 % terhadap PDRB.

Perkebunan mempunyai kedudukan yang penting di dalam pengembangan pertanian baik di tingkat nasional maupun regional. Luas lahan perkebunan di Kabupaten Siak pada tahun 2000 adalah 132.351 Ha. Dari data luas lahan dan produksi perkebunan memperlihatkan bahwa komoditas kelapa sawit memiliki nilai produksi dan luas lahan terbesar bila dibandingkan dengan komoditas lainnya, yaitu seluas 107.420 Ha atau sebesar 81,16 % dari lahan perkebunan, disusul komoditas karet dengan lahan seluas 22.025 Ha.

Hutan mempunyai peranan yang penting bagi stabilitas keadaan susunan tanah dan isinya. Berdasarkan fungsi hutan, luas hutan di Kabupaten Siak berdasarkan RUTRK tahun 2002 adalah 572.798,00 Ha, yang terdiri dari fungsi hutan lindung sekitar 45,28 %, fungsi hutan produksi sekitar 36,88 % dan sisanya merupakan fungsi hutan produksi terbatas dan hutan lainnya.

Tabel 11 : Luas dan Persentase Hutan di Kabupaten Siak Menurut Fungsi, tahun 2002

Fungsi	Luas (Ha)	%
1. Hutan Lindung	259.356,00	45,28
2. Hutan Produksi	211.237,00	36,88
3. Hutan Produksi Terbatas	40.125,00	7,01
4. Hutan Lainnya	62.080,00	10,83
Jumlah	572.798,00	100,00

Sumber : RUTR Kabupaten Siak Tahun 2002

3. Industri Pengolahan

Selama periode 1999-2001 perekonomian Kabupaten Siak didominasi oleh sektor industri pengolahan yang mempunyai nilai strategis, karena rata-rata kontribusinya sekitar 48,75 % terhadap perekonomian di Kabupaten Siak.

Perusahaan industri yang ada di Kabupaten Siak terdiri atas dua golongan, yaitu Industri Besar/Sedang dan Industri Kecil dan Kerajinan Rumah Tangga (IKKRT).

Pada tahun 2001 industri besar/średang di Kabupaten Siak berjumlah 52 perusahaan dengan 25.837 orang tenaga kerja. Sedangkan industri kecil dan kerajinan rumah tangga berjumlah 21 perusahaan dengan jumlah tenaga kerja sekitar 101 orang.

Dari data yang diperoleh ternyata sebagian besar industri kategori besar dan sedang di Kabupaten Siak memiliki hasil produksi kayu, dan seluruhnya merupakan industri pengolahan hasil hutan dengan bahan baku berasal dari hutan industri di Kabupaten Siak sendiri maupun dari daerah lain di luar Kabupaten Siak.

Tabel 12: Produksi Kayu Olahan di Kabupaten Siak, Tahun 2001

Jenis Produksi	Produksi
1. Kayu Gergajian	14.687,65 M 3
2. Kayu Lapis	382.684,35 M 3
3. Veneer	75.211,67 M 3
4. Bahan Baku Serpih	1.270.484,62 M 3
5. PULP	1.347.079,73 Ton
6. Block board	39.136,09 M 3
7. Dowels	159.449,94 M 3
8. Fancy wood	2.603,70 M 3

Sumber : Dinas Kehutanan Kabupaten Siak

Jenis usaha industri kecil dan kerajinan rumah tangga adalah berupa industri makanan dan minuman, industri hanya barang-barang dari kayu dan industri barang dari logam. Sejak tahun 1993 sampai dengan 2001 mengalami perkembangan yang berarti, namun demikian kontribusi terhadap perekonomian Kabupaten Siak relatif sangat kecil yaitu rata-rata sekitar 0,55%. Keadaan ini menjadi suatu piramida yang terbalik, karena secara ideal untuk menghasilkan suatu struktur perekonomian yang stabil industri kecil-menengah harus mempunyai kontribusi yang besar terhadap perekonomian daerah. Kabupaten Siak bertekad untuk mendorong pertumbuhan industri kecil menengah ini dengan melakukan langkah-langkah konsolidasi seperti pembangunan zona-zona industri kecil-menengah sehingga dukungan sarana dan prasarana seperti utilitas (listrik, air, gas), telekomunikasi, jaringan internet dalam suatu “lembah silikon” dapat difokuskan.

4. Perdagangan Luar Negeri

Ekspor dan Impor merupakan salah satu indikator makro dalam perekonomian suatu daerah. Kemampuan ekspor suatu daerah menunjukkan tingkat kemajuan dalam daya saing produk daerah tersebut terhadap pasar internasional. Impor menunjukkan beberapa hal, salah satunya adalah tidak tersedianya suatu komoditi di daerah tersebut, karena belum mampu memproduksi atau mencukupi kebutuhan terhadap jenis barang-barang tertentu.

Aktivitas perdagangan Internasional dilakukan dengan menggunakan beberapa pelabuhan, yaitu Pelabuhan Buatan, Pelabuhan Perawang, dan Pelabuhan Siak Sri Indrapura. Adapun yang menjadi negara tujuan utama kegiatan ekspor adalah Taiwan dan Hongkong. Sedangkan negara yang terutama menjadi asal kegiatan impor adalah Singapura dan Amerika Serikat.

Ekspor Siak pada tahun 2001 tercatat sebesar US\$ 702,20 juta, mengalami penurunan 5,73 % dibanding tahun sebelumnya. Taiwan merupakan negara tujuan ekspor yang menghasilkan devisa terbesar di antara beberapa negara tujuan lainnya, yaitu sebesar US\$ 100,76 juta atau 14,35 % dari total nilai ekspor, kemudian disusul Hongkong yang mempunyai kontribusi sebesar US\$ 94,61 juta atau 13,47 %. Komoditas ekspor yang utama adalah kertas dan barang dari kertas dengan nilai US\$ 331,78 juta atau 47,25 % dari total nilai ekspor, kemudian disusul ekspor bahan kertas dengan nilai US\$ 295,41 juta atau 42,07 % dari total nilai ekspor, serta ekspor kayu lapis dengan nilai US\$ 59,39 juta atau 8,46 % dari total nilai ekspor. Dari kegiatan ekspor tersebut tergambar bahwa 97,78 % dari total nilai ekspor Kabupaten Siak pada tahun 2001 merupakan ekspor komoditi yang berasal dari sektor industri pengolahan hasil hutan, yang mempunyai nilai strategis karena memberikan kontribusi terbesar terhadap perekonomian Kabupaten Siak yaitu rata-rata 48,75 % dari PDRB.

Selama tahun 2001 nilai impor Kabupaten Siak mencapai US\$ 81,84 juta, berarti terjadi penurunan nilai impor sebesar 69,23 %. Singapura merupakan asal barang impor terbesar dengan nilai US\$ 25,09 juta, diikuti Amerika Serikat dengan nilai impor US\$ 9,10 juta dan Taiwan sebesar US\$ 7,96 juta. Komoditi impor terbesar adalah hasil industri lainnya dengan nilai US\$ 34,48 juta atau sebesar 42,13 % dari total nilai impor.

Meskipun terjadi penurunan kinerja ekspor selama Tahun 2001, namun penurunan kinerja impor jauh lebih besar sehingga surplus neraca perdagangan juga meningkat yaitu sebesar 29,55 % terhadap tahun 2002. Secara total neraca perdagangan Kabupaten Siak tahun 2001 surplus sebesar US\$ 620,36 juta.

Dengan adanya rencana pengembangan kawasan industri dan pelabuhan samodera dengan areal seluas ± 5.000 Ha yang terletak di Tanjung Buton, Mengkapan beserta segala infra-struktur yang mendukungnya, maka akan memberikan dampak yang sangat positif dalam memperkuat struktur perekonomian Kabupaten Siak.

D. PERMASALAHAN DAN KENDALA YANG DIHADAPI

1. Lemahnya Penegakan Hukum.

Pada masa lalu masalah supremasi hukum dan pemerintahan yang bersih dari tingkat pusat sampai tingkat daerah hanyalah sebagai slogan atau retorika politik belaka. Masalah hukum dan politik telah disalahgunakan sebagai alat untuk mempertahankan kekuasaan dan memperjuangkan kepentingan elit, pelaku ekonomi dan untuk melakukan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Akibatnya masalah hukum dan penyelenggaraan pemerintahan mulai dari tingkat pusat hingga daerah telah merugikan kepentingan masyarakat secara luas. Permasalahan penegakan hukum dan penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan berwibawa sulit untuk ditegakan.

Otonomi daerah telah membuka peluang bagi pemerintah daerah untuk melakukan pembangunan di segala bidang, dan terbukanya investasi dari pihak luar menjadi hal yang sangat penting bagi kelanjutan pembangunan di bidang ekonomi dan kepentingan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu perangkat aparat, kebijakan, sarana dan prasarana serta implementasinya yang dapat menjadi kendala bagi penegakan hukum dan iklim investasi harus segala dibenahi.

Undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, telah memberikan kesempatan bagi daerah untuk menentukan kelembagaan strategis pemerintah daerah. Kesempatan ini harus dimanfaatkan seefektif mungkin, dengan belajar dari daerah lain atas segala kelebihan dan kekurangannya, serta pengalaman masa lalu yang banyak merugikan masyarakat dan daerah Kabupaten Siak sendiri. Oleh karena itu agenda lokal di era reformasi ini adalah mengembalikan kedaulatan hukum di tangan rakyat, dengan memberdayakan masyarakat yang diekspresikan pada peranan sumbangan hukum. Kekuasaan negara yang sangat dominan dalam pembuatan (*legislation*), peradilan (*judiciary*) dan pelaksanaan (*enforcement*), yang dapat menghambat partisipasi masyarakat harus dikurangi.

Secara umum kendala kendala yang dapat mempengaruhi lemahnya penegakan hukum adalah masih kurangnya pengetahuan masyarakat tentang hukum dan sebagian masyarakat yang mengutamakan derajat/haknya sendiri, sehingga menimbulkan hubungan hukum yang kurang harmonis, dan akan menjadi kendala bagi daerah dalam upaya percepatan pemulihan penegakan hukum untuk kelancaran pembangunan daerah.

2. Rendahnya Kualitas Sumber Daya Manusia

Rendahnya kualitas sumber daya terukur dari masih rendahnya tingkat pendidikan, masih rendahnya derajat kesehatan masyarakat dan belum produktifnya tenaga kerja di Kabupaten Siak.

- a. Tingkat pendidikan masyarakat Kabupaten Siak masih tergolong rendah. Penduduk berumur 10 tahun ke atas yang menamatkan pendidikan dasar sebesar 29,82 %, sedangkan yang menamatkan pendidikan menengah atas sebanyak 17,74 % dan penduduk dengan tingkat pendidikan perguruan tinggi sebesar 2,16 %. Hal ini menunjukkan jumlah penduduk berumur 15 tahun keatas yang bekerja yaitu sekitar 159.884 jiwa mempunyai tingkat pendidikan relatif rendah.
 - b. Kesehatan masyarakat masih merupakan masalah utama di kabupaten Siak, hal ini disebabkan kurangnya jangkauan pelayanan kesehatan sewaktu wilayah Kabupaten Siak masih merupakan bagian dari Kabupaten Bengkalis. Dengan terbentuknya Kabupaten Siak. Masalah kesehatan masyarakat tersebut meliputi masih tingginya angka balita gizi buruk yang didapatkan dari pemantauan status gizi (PSG) tahun 2001
-

yaitu sebesar 3,1 % dari seluruh balita. Angka ini tertinggi di seluruh Kabupaten/Kota di Propinsi Riau. Sementara itu 50 % dari masyarakat masih belum menggunakan garam beryodium, sehingga menyebabkan tingginya angka gangguan akibat yodium (GAKY). Disamping itu dari hasil survey anemia anak SD yang dipusatkan di Kecamatan Tualang, ditemukan 85 % - 90 % masih menderita anemia. Masalah lain dari kesehatan masyarakat yang sekaligus merupakan ukuran derajat kesehatan masyarakat adalah tingginya angka kematian ibu (AKI) dimana terdapat 320/100.000. Disamping itu angka kematian bayi (AKB) juga masih cukup tinggi yaitu sebesar 42/1.000 kelahiran hidup. Hal ini dapat disebabkan masih rendahnya kunjungan ibu hamil untuk memeriksakan kehamilannya kepada petugas kesehatan. Selama kehamilan ibu hamil diharapkan dapat memeriksa kesehatannya maksimal 4 kali dalam rangka

- c. mendapatkan pelayanan berupa pemeriksaan berkala, mendapatkan tablet Fe, suntikan tetanus Toxoid (TT). Di kabupaten Siak terdapat hanya 63,4 % dari ibu hamil yang memeriksakan dirinya ke petugas kesehatan. Penyakit menular mendapat perhatian adalah masalah TB dan endemis Malaria. Dari hasil pengobatan TB sudah dilaksanakan, ditemukan angka kesembuhan penderita masih dibawah 50 %. Sedangkan angka malaria Klinis berada diatas angka Nasional yaitu 179 per 1000 penduduk. Disamping itu masih ditemukan tingginya angka kesakitan penyakit menular lainnya. Dalam hal kesehatan lingkungan, pemakaian air bersih masih sangat rendah. Angka penggunaan air bersih di pedesaan baru mencapai tingkat 20 % dari 60 % yang ditargetkan, sedangkan di perkotaan baru mencapai 25 % dari 80 % yang ditargetkan secara nasional.
- d. Tenaga kerja yang tersedia kurang inovatif, kreatif dan kurang mampu memanfaatkan teknologi, sehingga belum mampu menjadi tenaga kerja yang mandiri dan menjadi wirausaha yang kuat yang dapat menopang pertumbuhan ekonomi. Dengan jumlah penduduk miskin relatif tinggi, menunjukkan indikasi bahwa jumlah tenaga kerja yang tersedia memiliki keterampilan dan pendidikan yang terbatas sehingga sulit menembus lapangan kerja yang ada. Pasar kerja pada umumnya menunjukkan bahwa jumlah tenaga kerja selalu lebih besar dari lapangan kerja yang tersedia, sehingga menimbulkan adanya tingkat pengangguran. Jumlah penduduk di Kabupaten Siak usia 10 tahun ke atas yang sedang mencari pekerjaan sebanyak 2.341 jiwa. Bertolak dari data distribusi jenjang pendidikan formal, diketahui bahwa sebesar 17,74 % angkatan kerja berada pada jenjang pendidikan sekolah menengah atas, dan sebanyak 27,72 % tidak menamatkan pendidikan dasar. Belum memadainya kualitas tenaga kerja dan ketidaksesuaian antara tingkat pendidikan/keterampilan yang dimiliki tenaga kerja dengan formasi pekerjaan yang tersedia (dunia usaha), sehingga berdampak pada rendahnya tingkat penyerapan tenaga kerja. Demikian juga dengan tingkat pendidikan penguasaan teknologi di kalangan masyarakat yang masih tergambar pada cara kerja (berusaha) dalam mencari nafkah, yang masih menggunakan pola tradisional dan kurangnya penguasaan informasi pasar. Sebagai konsekuensi dari rendahnya kualitas SDM ini adalah rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat secara umum. Di kalangan aparatur pemerintahan, sebagian besar para pegawainya masih baru dan belum berpengalaman, sehingga masih perlu mendapatkan pendidikan dan latihan lanjutan agar lebih profesional dalam melayani kepentingan masyarakat.

3. Lambatnya Pemulihan Ekonomi.

Krisis ekonomi yang berkepanjangan yang dialami bangsa Indonesia, telah berkembang menjadi krisis di segala bidang, sehingga mengakibatkan hilangnya kepercayaan terhadap kemampuan perekonomian nasional dalam menghadapi badai krisis. Hilangnya kepercayaan telah menyebabkan goncangan nilai rupiah yang berpengaruh langsung terhadap investasi swasta. Hutang luar negeri swasta, yang dalam jumlah besar bersifat jangka pendek dan sebagian besar dipengaruhi oleh gejala nilai tukar rupiah, telah menjadi beban yang sulit dikendalikan dan menghambat roda perekonomian. Akibatnya kredit macet semakin membengkak dan sangat berpengaruh terhadap kinerja perbankan yang merupakan jantung pembiayaan perekonomian daerah dan nasional.

Lambatnya pemulihan ekonomi, karena landasan ekonomi Indonesia yang kurang kuat. Bidang ekonomi swasta dalam melaksanakan kegiatannya tidak berakar pada daya saing, tetapi lebih mengandalkan pada akses untuk memperoleh kemudahan. Keadaan ini menimbulkan ketimpangan dalam standar dunia usaha yaitu sebagian besar ekonomi terpusat pada sebagian kecil masyarakat. Terpusatnya kegiatan ekonomi pada kelompok dunia usaha yang tidak memiliki daya saing yang diikuti oleh pranata dan kelembagaan yang kurang baik, telah mengakibatkan rapuhnya landasan perekonomian.

Penduduk yang bertempat tinggal tetap di Kabupaten Siak berjumlah 256.097 jiwa yang sebagian besar tinggal di pedesaan. Hal ini menunjukkan perekonomian Kabupaten Siak masih bertumpu pada ekonomi pedesaan yang titik beratnya pada sektor pertanian khususnya sub sektor perkebunan dan sub sektor kehutanan. Hal ini dapat dilihat dari kontribusi sub sektor perkebunan yang mencapai 49,99 % pada tahun 2001 dan diikuti oleh sub sektor kehutanan yang pada tahun 2001 memberi kontribusi sebesar 32,07 % pada PDRD sektor pertanian.

Oleh karena itu, dengan tidak melupakan pertumbuhan perekonomian di sektor lain, pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan sektor industri berbasis komoditi pertanian dan komoditi perkebunan perlu mendapatkan perhatian khusus.

Sementara itu perekonomian secara keseluruhan segera akan berhadapan dengan sejumlah tantangan eksternal yang sangat besar. Tantangan tersebut terutama berkaitan dengan arus liberalisasi dan globalisasi ekonomi sebagai hasil kesepakatan perdagangan dan investasi multi lateral dan regional.

4. Potensi ekonomi kerakyatan yang masih belum diberdayakan.

Adapun permasalahan dalam bidang ekonomi kerakyatan ini dapat dilihat antara lain pada :

- a. Potensi sumber daya alam belum dikelola dengan optimal, sehingga belum memberikan dampak yang berarti bagi peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat.
- b. Lembaga keuangan yang melayani kepentingan usaha rakyat (mitra usaha), baik perbankan maupun lembaga keuangan bukan bank masih sangat terbatas.
- c. Pemasaran hasil produksi, terutama komoditi hasil perkebunan masih belum memadai.
- d. Adanya kecenderungan dominasi kegiatan ekonomi oleh kelompok pelaku ekonomi yang mempunyai modal besar dan kurangnya daya serap tenaga kerja, sehingga tingkat pengangguran masih tingginya.

5. Belum optimalnya kapasitas daerah dan pemberdayaan masyarakat.

Pemberlakuan Undang Undang Nomor 22 tahun 1999 menganut asas desentralisasi yang memberi kesempatan dan keleluasaan bagi daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Adanya keleluasaan bagi daerah haruslah diupayakan untuk mengutamakan pemberdayaan masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan kreatifitas, meningkatkan peran serta masyarakat dan mengembangkan peran serta fungsi DPRD.

Eksistensi Kabupaten Siak sebagai daerah otonom mempunyai kewenangan untuk membentuk dan melaksanakan kebijakan menurut prakarsa dan aspirasi masyarakat secara luas, nyata dan bertanggungjawab, sesuai dengan kewenangan yang ditetapkan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Bertanggung-jawab haruslah diartikan sebagai upaya melaksanakan tugas pokok dan fungsi pemerintahan untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat, pengembangan kehidupan berdemokrasi, menumbuhkan rasa keadilan dan memberikan perlindungan rasa aman bagi kehidupan masyarakat. Untuk melaksanakan tugas dan

tanggungjawab serta kewenangan yang semakin luas dalam menghadapi era reformasi, diperlukan fungsi kelembagaan yang efektif dan efisien serta aparatur pemerintah yang berkualitas, dengan sikap dan perilaku yang berintikan pengabdian, kejujuran, tanggungjawab, disiplin, memiliki integritas moral dan profesional.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan, yang dapat menyebabkan lemahnya kelembagaan dan aparatur daerah :

- a. Struktur organisasi yang belum menerapkan sistem miskin struktur dan kaya fungsi, sehingga kegiatan pemerintahan belum dapat berjalan secara efisien.
- b. Kurangnya kemampuan dan kemauan aparat untuk memahami dan mengaplikasikan TUPOKSI, sehingga keberadaannya belum benar-benar dirasakan oleh masyarakat.
- c. Penempatan personil yang belum disesuaikan dengan kompetensi, keahlian dan latar belakang.
- d. Kualitas SDM yang kurang memadai, akan mengakibatkan produktivitas kerja rendah.
- e. Pendelegasian wewenang yang tidak jelas sesuai dengan TUPOKSI-nya, akan mengakibatkan pertanggung-jawaban yang kurang memadai dan menimbulkan pelaksanaan kegiatan yang tumpang-tindih
- f. Kurang berfungsinya pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*).

6. Kemiskinan dan Pengangguran.

Tingginya jumlah desa miskin dan penduduk miskin di Kabupaten Siak pada tahun 2001 yaitu 24,54 % desa miskin dan terisolir serta 8,98 %(*) penduduk miskin, karena sarana yang mendukung perekonomian masyarakat sangat terbatas. Kabupaten Siak baru terbentuk sesuai Undang Undang Nomor 53 Tahun 1999, sebelumnya merupakan kecamatan yang berada di wilayah Kabupaten Bengkalis. Hal tersebut mengakibatkan penyaluran dana dari kabupaten untuk penyediaan infrastruktur di berbagai sektor kegiatan, khususnya infrastruktur yang berkaitan dengan fasilitas pendukung pertumbuhan ekonomi menjadi kurang memadai.

Dengan jumlah penduduk miskin relatif tinggi, menunjukkan indikasi bahwa jumlah tenaga kerja yang tersedia memiliki ketrampilan dan pendidikan yang terbatas sehingga sulit menembus lapangan kerja yang ada.

Pasar kerja pada umumnya menunjukkan bahwa jumlah tenaga kerja selalu lebih besar dari lapangan kerja yang tersedia, sehingga menimbulkan adanya tingkat pengangguran. Jumlah penduduk di Kabupaten Siak usia 10 tahun ke atas yang sedang mencari pekerjaan sebanyak 2.341 jiwa.

Bertolak dari data distribusi jenjang pendidikan formal, diketahui bahwa sebesar 17,74 % angkatan kerja berada pada jenjang pendidikan sekolah menengah atas, dan sebanyak 27,72 % tidak menamatkan pendidikan dasar. Belum memadainya kualitas tenaga kerja dan ketidaksesuaian antara tingkat pendidikan/ keterampilan yang dimiliki tenaga kerja dengan formasi pekerjaan yang tersedia (dunia usaha), sehingga berdampak pada rendahnya tingkat penyerapan tenaga kerja.

Tingginya jumlah desa miskin dan penduduk miskin mempunyai korelasi dengan kendala pertumbuhan ekonomi karena :

- a. Rendahnya kualitas sumber daya manusia, sebagai akibat dari rendahnya tingkat pendidikan, ketrampilan dan kesehatan masyarakat.
- b. Tenaga kerja yang tersedia kurang inovatif, kreatif dan kurang mampu memanfaatkan teknologi, sehingga belum mampu menjadi tenaga kerja yang mandiri dan menjadi wira usaha yang kuat yang dapat menopang pertumbuhan ekonomi.
- c. Investasi modal dan kemampuan manajemen masyarakat relatif rendah, sehingga industri rakyat sulit untuk mengembangkan usahanya dan belum mampu menjadi landasan yang kuat bagi pertumbuhan ekonomi.

- d. Kurangnya sarana dan prasarana pendukung perekonomian masyarakat, sehingga kemampuan produksi dan pemasaran rendah.
- e. Kurangnya sarana dan prasarana transportasi inter dan antar kecamatan sehingga menghambat kegiatan ekonomi masyarakat.
- f. Potensi sumberdaya alam daerah belum dapat dikelola secara optimal.

7. Terbatasnya Infrastruktur.

Pada awal terbentuknya Kabupaten, Siak menghadapi keterbatasan jaringan transportasi dan komunikasi. Kabupaten ini merupakan satu satunya kabupaten yang tidak memiliki jalan dengan kualifikasi jalan propinsi menuju ibukota kabupaten. Padahal infrastruktur tersebut merupakan hal vital yang mutlak diperlukan dalam pengembangan suatu daerah karena sangat berpengaruh dalam segala aspek kehidupan masyarakat maupun aktivitas perekonomian di berbagai sektor lainnya.

Sampai saat ini pada lingkungan internal, masih terdapat daerah-daerah yang masih terisolir dan belum terjangkau, serta belum lancarnya akses ke daerah-daerah kawasan strategis dan cepat tumbuh maupun akses dari desa-desa potensial ke pasar. Di lain pihak dilihat dari lingkungan eksternal, Kabupaten Siak merupakan daerah transit yang penting antara Riau Daratan dan Riau Kepulauan dengan peluang makin besarnya frekwensi lalu-lintas antara Propinsi Riau dan Propinsi Kepulauan Riau yang melewati Kabupaten Siak.

Kondisi pada saat ini menggambarkan, bahwa jaringan infra-struktur yang ada belum dapat mengimbangi semakin tingginya tingkat aksesibilitas dan laju perkembangan sentra-sentra pertumbuhan ekonomi baik yang ada di Kabupaten Siak sendiri maupun di wilayah sekitar sebagai *hinterland*.

Di samping itu di Kabupaten Siak juga menghadapi kendala karena sangat terbatas sarana utilitas, seperti sarana listrik, air bersih/air minum dan telekomunikasi.

Dengan demikian pembangunan wilayah dan pengembangan infrastruktur di berbagai sektor merupakan suatu kebutuhan yang sangat mendesak untuk segera diwujudkan.

BAB III VISI, MISI DAN NILAI

A. VISI PEMBANGUNAN KABUPATEN SIAK

Dalam suatu institusi pemerintahan modern, perumusan visi dalam pelaksanaan pembangunan mempunyai arti yang sangat penting mengingat semakin majunya perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi informasi, peradaban masyarakat dan arus globalisasi, yang pada intinya telah mengakibatkan perubahan yang mendasar dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat.

Dalam konteks otonomi daerah, beban dan tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan semakin berat. Oleh karena itu Pemerintah Daerah harus mampu mengemban amanah pembangunan melalui pemanfaatan segenap potensi sumber daya yang ada di daerah secara efisien dan efektif serta semakin dituntut untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara maksimal.

Melalui perumusan visi, masyarakat akan dapat mengetahui seberapa jauh komitmen dan strategi Pemerintah Daerah untuk mewujudkan pembangun pada berbagai aspek kehidupan di masa yang akan datang, sehingga dapat dijadikan sebagai landasan untuk memilih strategi dan kebijakan dalam rangka memanfaatkan peluang sekaligus dapat mengantisipasi dampak negatif dari kemajuan dan perubahan peradaban dunia.

Sesuai dengan Pola Dasar Pembangunan Kabupaten Siak Tahun 2002-2006, Pemerintah Kabupaten Siak menetapkan visi pembangunan sebagai berikut :

Terwujudnya Kabupaten Siak Sebagai Pusat Budaya Melayu di Riau yang Didukung oleh Agribisnis, Agroindustri dan Pariwisata Yang Maju dalam Lingkungan Masyarakat yang Agamis dan Sejahtera Pada Tahun 2020

Makna yang terkandung di dalam visi pembangunan daerah tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Potensi sumber daya alam yang sangat menonjol dapat dimanfaatkan sebagai tumpuan dasar gerak pembangunan dengan mempertimbangkan sumber daya alam yang dapat diperbaharui.
- b. Potensi pertanian dan perkebunan dalam arti luas dibinakan sebagai acuan utama pengembangan kehidupan masyarakat Kabupaten Siak yang berfokus pada kegiatan agribisnis dan agroindustri.
- c. Gerak pembangunan yang berfokus pada kegiatan agribisnis dan agroindustri ini, diharapkan mendorong Kabupaten Siak pada tahun 2020 menjadi pusat kegiatan tersebut di wilayah Propinsi Riau.
- d. Bertumpu pada faktor sejarah Kabupaten Siak, pembangunan Kabupaten Siak mendorong kegiatan tujuan pariwisata budaya dan menjadikan Kabupaten Siak sebagai pusat budaya Melayu.

B. Misi Pembangunan Kabupaten Siak

Misi merupakan gambaran kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka pencapaian suatu visi, yang selanjutnya dijadikan sebagai suatu pedoman dalam penyusunan strategi, prioritas kebijakan, penyusunan program dan pengalokasian sumber daya daerah.

Untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Siak, maka di dalam menyusun rencana strategis tahap pertama untuk lima tahun ke depan ditetapkan rumusan misi pembangunan Kabupaten Siak sebagai berikut :

1. Mengembangkan dan meningkatkan Sumber Daya Manusia profesional yang dilandasi keimanan dan ketaqwaan, serta penguasaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dalam lingkungan nilai-nilai Budaya Melayu.
2. Meningkatkan kemampuan dan kapasitas Pemerintah Daerah demi terwujudnya pemerintahan yang baik (Good Governance).
3. Memberdayakan masyarakat dan seluruh kekuatan ekonomi daerah dengan memperkuat struktur perekonomian berbasis kerakyatan yang bertumpu pada agribisnis dan agroindustri.
4. Mengembangkan dan meningkatkan infrastruktur daerah yang mendukung peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Makna yang terkandung dalam masing-masing misi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Mengembangkan dan meningkatkan Sumber Daya Manusia profesional yang dilandasi keimanan dan ketaqwaan, serta penguasaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dalam lingkungan nilai-nilai Budaya Melayu. Misi ini mempunyai makna, bahwa Kabupaten Siak bermaksud akan mewujudkan sumber daya manusia berkualitas, yaitu:
 - 1) Memiliki tingkat pendidikan yang memadai, dapat menguasai serta menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, peningkatan dan perluasan pendidikan dan budaya yang relevan dengan pembangunan daerah.
 - 2) Taat melaksanakan dan mengamalkan agama serta menjadikannya sebagai landasan moral dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta berperilaku sesuai kaidah dan nilai-nilai budaya Melayu.

- 3) Memiliki derajat kesehatan, memiliki keterampilan kerja dan tingkat kesejahteraan sosial yang memadai, sehingga dapat berperan dalam membangun daerah terutama mendukung pembangunan sektor industri berbasis komoditi kehutanan dan komoditi perkebunan.
 - 4) Sumber daya manusia aparatur negara yang berfungsi melayani masyarakat secara profesional, berdaya guna dan produktif.
 - 5) Sumber daya manusia masyarakat yang produktif, kreatif, inovatif, berketrampilan, mandiri dan memiliki daya saing
2. Meningkatkan kemampuan dan kapasitas Pemerintah Daerah demi terwujudnya pemerintahan yang baik (*Good Governance*).
- Misi tersebut mempunyai maksud bahwa Pemerintah Kabupaten Siak berkeinginan untuk mewujudkan adanya suatu pemerintahan yang baik, sebagai upaya perbaikan kinerja aparatur pemerintahan dan kelembagaan daerah sesuai dengan kewenangan yang dimiliki serta untuk menyikapi tuntutan masyarakat atas transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah dan tuntutan persaingan dalam era globalisasi. Hal tersebut akan terealisasi dengan mengaktualisasikan kondisi sebagai berikut :
- 1) Pembangunan sistem (organisasi, prosedur, dan tata laksana) pelayanan kepada masyarakat yang cepat, tepat, adil dan transparan dan didasarkan pada prinsip kemitraan antara pemerintah, pengusaha serta masyarakat.
 - 2) Meningkatkan wawasan dan kemampuan kewirausahaan serta profesionalisme aparatur pemerintah.
 - 3) Membangun sikap dan perilaku penyelenggara pemerintahan yang menghormati dan menjunjung tinggi hukum yang berlaku.
3. Memberdayakan masyarakat dan seluruh kekuatan ekonomi daerah dengan memperkuat struktur perekonomian berbasis kerakyatan yang bertumpu pada agribisnis dan agroindustri, dengan maksud :
- 1) Meningkatkan pendayagunaan potensi sumber daya daerah secara bijaksana dan terencana guna mendukung pengembangan ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada agribisnis dan agroindustri, terutama komoditi pertanian dan komoditi kehutanan.
 - 2) Membangun landasan ekonomi yang kuat bagi pertumbuhan ekonomi kerakyatan dan meningkatkan pendapatan masyarakat dengan memacu pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan sektor industri berbasis komoditi pertanian dan kehutanan.
 - 3) Menciptakan iklim investasi yang kondusif guna mendukung percepatan pengembangan perekonomian berbasis pada pengembangan agribisnis dan agroindustri.
 - 4) Menumbuhkembangkan usaha kecil, menengah dan koperasi yang didukung pengusaha besar melalui kemitraan yang saling menguntungkan.
4. Mengembangkan dan meningkatkan infrastruktur daerah yang mendukung peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan daerah yang berkelanjutan. Misi ini bermaksud :
- a) Meningkatkan dan mengembangkan prasarana dan sarana transportasi antar wilayah dan infrastruktur lainnya guna mendukung upaya percepatan perkembangan sektor industri dan sektor ekonomi lainnya.
 - b) Meningkatkan pengembangan potensi wilayah melalui pengembangan ekonomi wilayah, pengembangan wilayah strategis, pembangunan pedesaan dan perkotaan, pengembangan perumahan/permukiman, penyehatan lingkungan permukiman, pengembangan wilayah tertinggal, serta penataan ruang dan pengelolaan pertanahan berdasarkan konsep keseimbangan spasial dan berwawasan lingkungan untuk mempercepat pemerataan pembangunan antar daerah.
-

A. NILAI (VALUE)

Nilai adalah sesuatu atau kaidah-kaidah yang dimiliki dan dianut dan dijadikan pedoman didalam berpikir dan berperilaku. Adapun nilai-nilai luhur yang dianut dalam mewujudkan visi dan misi, yaitu sebagai berikut :

1. Religius.

Menunjukkan perilaku taat mengamalkan ajaran agama yang dianut dan direfleksikan dalam kehidupan sehari-hari, antara lain sikap :

- Menghargai kaidah, tradisi, dan nilai-nilai luhur budaya bangsa
- Saling menghormati dan menghargai sesama
- Terbentuknya integritas moral dan menjadikannya sebagai landasan di dalam melaksanakan aktivitas pemerintahan dan pembangunan

2. Budaya Melayu

Menunjukkan suatu sikap dan perilaku yang menjunjung tinggi kaidah-kaidah serta tatanan nilai budaya melayu yang diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari.

3. Berkeadilan

Menunjukkan perilaku yang mencerminkan sikap adil dan jujur dalam menempatkan seluruh anggota masyarakat yang demokratis serta mempunyai hak dan kesempatan yang sama.

Sikap dan perilaku yang dianut adalah :

- Hidup bersama dalam kesetaraan hak dan kewajiban.
- Hidup bersama dalam suasana yang damai, menghargai keanekaragaman asas dan kepentingan

4. Akuntabel

Merefleksikan tingkat amanah suatu pemerintahan dan pelaku pembangunan yang telah diberi amanah untuk mengelola sejumlah sumberdaya sehingga tujuan-tujuan pembangunan dapat dicapai.

5. Profesionalisme

Profesionalisme mempunyai pengertian bahwa suatu pekerjaan atau aktivitas pembangunan, pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat dilakukan dengan menggunakan keahlian yang tertentu dan mendalam (vokasi), yang diikuti dengan tanggungjawab (*responsibility*) dalam menjalankan amanah. Dengan demikian tidak ada satu pekerjaan pun yang tak terdefiniskan dan yang tak mempunyai kriteria, sehingga persaingan atau kompetisi dapat dilakukan secara sehat dan obyektif.

6. Efisiensi

Efisiensi menunjukkan penggunaan sumber daya yang secara ekonomis dianggap tepat.

7. Efektifitas

Efektivitas menunjukkan ketepatan metode, mekanisme, dan cara kerja dalam melaksanakan suatu aktivitas pembangunan.

BAB IV

ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS DAN FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN

A. Analisis Lingkungan Strategis

Kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi telah mendorong terjadinya perubahan dalam berbagai segi kehidupan berbangsa dan bernegara. Banyak perubahan mendasar yang perlu kita cermati dalam pelaksanaan pembangunan daerah, seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Fenomena tersebut menyebabkan batas antar beberapa negara menjadi *borderless*, dengan konsekuensi yang besar yakni mudahnya arus transformasi nilai-nilai perubahan yang masuk secara terbuka ke suatu daerah, terutama bagi Kabupaten Siak yang memiliki kedudukan strategis baik di Kawasan Regional, Nasional maupun Internasional.

Arus perubahan tersebut akhirnya dapat mengakibatkan perubahan tata nilai ekonomi, sosial, budaya dan politik yang bisa berdampak positif maupun negatif terhadap proses pembangunan Kabupaten Siak.

Fenomena-fenomena tersebut apabila kita cermati akan merupakan peluang sekaligus ancaman bagi suatu negara, terutama bagi negara-negara sedang berkembang. Fenomena globalisasi dalam bidang ekonomi telah menyebabkan semakin banyak dan mudahnya bagi masyarakat untuk memperoleh produk-produk bertaraf internasional dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Kondisi ini merupakan peluang bagi masyarakat untuk mengembangkan usahanya, terutama bagi mereka yang mempunyai *skill* dalam mengelola usahanya. Sebaliknya bagi kebanyakan masyarakat dengan bekal pengetahuan yang kurang, maka akan berhadapan dengan pesaing dari negara lain yang lebih efisien dan berkualitas dalam memproduksi barang dan jasa.

Selanjutnya globalisasi dalam bidang komunikasi dan informasi memberikan peluang kepada masyarakat untuk mengakses berbagai kebutuhan informasi yang dikehendaki. Akibatnya menimbulkan pergeseran yang mendasar terhadap nilai-nilai yang ada di masyarakat. Masyarakat menjadi sangat terbuka dan kritis terhadap persoalan-persoalan yang menyangkut kehidupan bersama. Dalam perekonomian, globalisasi membawa implikasi perubahan budaya (*culture*) dan paradigma. Seringkali globalisasi ini diperlakukan sebagai suatu “jargon” sehingga orang lupa bahwa globalisasi mempunyai implikasi yang sangat serius. Beberapa perubahan budaya atau nilai penting yang terkait dengan globalisasi adalah efisiensi, produktivitas dan profesionalisme. Globalisasi berdampak terhadap budaya dan nilai-nilai ini. Jika Kabupaten Siak *commit* (mempunyai komitmen) dengan globalisasi maka masyarakat, pelaku pembangunan dan governance serta tata pemerintahan dan pembangunan juga harus menganut paradigma efisiensi, produktivitas dan profesionalisme.

Dalam tatanan kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat, tuntutan akan transparansi, akuntabilitas dan responsibilitas atas pelayanan yang diberikan oleh negara semakin meningkat. Perubahan yang terjadi mengakibatkan perubahan-perubahan yang mendasar baik dalam bidang politik maupun dalam penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena itu, tuntutan untuk membentuk pemerintahan yang bersih, bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme merupakan tuntutan yang tidak bisa ditawar lagi.

Tuntutan-tuntutan tersebut, merupakan konsekuensi yang harus ditanggung bersama oleh seluruh komponen masyarakat, khususnya penyelenggaraan negara dan pemerintahan, baik pada tingkat nasional, maupun regional dan lokal. Prinsip pemberian kewenangan yang lebih besar kepada daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan telah menjadi ketetapan bersama yang harus segera diimplementasikan.

Implikasi dari tuntutan-tuntutan tersebut akan mempengaruhi kinerja pemerintah sebagai pelayan masyarakat dan sebagai fasilitator pembangunan. Oleh karenanya agar organisasi pemerintahan daerah dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, maka Pemerintah Daerah harus mampu menanggapi dan memanfaatkan tantangan dan peluang yang ada secara efisien dan efektif. Selain itu, Pemerintah Daerah harus dapat mengidentifikasi, memanfaatkan dan mengembangkan kekuatan yang dimiliki, meminimalisir kelemahan yang ada agar mampu mengantisipasi dan menyesuaikan dengan perubahan yang sedang terjadi, serta merespon tuntutan yang semakin kuat dari masyarakat. Untuk itu, perlu adanya kajian terhadap kondisi lingkungan internal dan kondisi lingkungan eksternal.

1. Kondisi Lingkungan Internal.

Uraian mengenai kondisi lingkungan internal ini meliputi kekuatan (*Strengths*) dan kelemahan (*Weakness*) di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Siak. Yang dimaksud dengan kekuatan di sini adalah seluruh potensi yang dimiliki serta dapat mendukung kelancaran pelaksanaan program pembangunan Kabupaten Siak. Sedangkan yang dimaksud dengan kelemahan adalah segala sesuatu yang dipandang dapat menghambat kelancaran pelaksanaan program pembangunan daerah Kabupaten Siak.

Faktor-faktor Kekuatan (*Strengths*) :

a. Adat Istiadat Melayu.

Adat istiadat Melayu identik dengan kehidupan yang bernuansa religius dan taat menjalankan ibadah serta menjunjung tinggi kaidah-kaidah dan tananan nilai-nilai budaya Melayu. Hal tersebut berpengaruh pada terbentuknya integritas moral dan merupakan landasan yang paling utama dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan.

b. Posisi Strategis Wilayah Kabupaten Siak.

Kabupaten Siak adalah terletak pada wilayah yang sangat strategis, karena merupakan daerah transit yang penting antara Riau Daratan dan Riau Kepulauan dengan peluang makin besarnya frekwensi lalu-lintas antara Riau daratan dan Riau kepulauan yang melewati Kabupaten Siak. Hal itu juga didukung dengan semakin tingginya tingkat aksesibilitas dan laju perkembangan sentra-sentra pertumbuhan ekonomi baik yang ada di Kabupaten Siak sendiri maupun di wilayah sekitarnya.

Di samping itu alur Sungai Siak yang sebagian besar berada di wilayah Kabupaten Siak merupakan potensi yang cukup potensial untuk dikembangkan sebagai alur lintas kabupaten dan lintas propinsi, baik antar Riau Daratan maupun dengan Riau Kepulauan.

c. Potensi Sumber Daya Alam yang cukup besar.

Salah satu penopang sistem perekonomian dan sistem kemasyarakatan adalah pengelolaan sumber daya alam secara optimal. Rendahnya kualitas pengelolaan sumber daya alam akan berdampak pada rendahnya produktivitas.

Potensi sumber daya alam yang dimiliki antara lain adalah :

- Areal pertanian tanaman pangan seluas $\pm 32.785,5$ Ha
- Areal perkebunan dengan luas ± 132.351 Ha
- Areal hutan dengan luas $\pm 483.404,248$ Ha
- Bahan galian golongan A, meliputi minyak bumi dan gas
- Bahan galian golongan B, meliputi gambut
- Bahan galian golongan C, meliputi air bawah tanah

Potensi sumber daya alam galian air bawah tanah yang dimiliki oleh Kabupaten Siak cukup besar, namun belum dikelola. Disamping itu, perlu dilakukan upaya-upaya agar Pemerintah Kabupaten Siak diberi kewenangan untuk mengelola sumber daya alam minyak bumi sendiri.

d. Kegiatan Sektor Pertanian dan Industri Pengolahan yang besar.

Selama periode 1999-2001 perekonomian Kabupaten Siak didominasi oleh sektor industri pengolahan dan sektor pertanian. Peranan sektor industri pengolahan masih sangat strategis karena rata-rata kontribusinya sekitar 48,75% terhadap perekonomian Kabupaten Siak. Sedangkan sektor pertanian memberikan kontribusi secara rata-rata sekitar 29,69%. Bila besarnya kontribusi tersebut disatukan akan mengindikasikan tentang posisi potensi perekonomian di Kabupaten Siak sebenarnya dikuasai oleh kedua sektor tersebut, yaitu secara rata-rata sekitar 78,44%.

Kontribusi sektor pertanian terutama didukung oleh dua sub sektor unggulan, yaitu subsektor perkebunan dan subsektor kehutanan yang merupakan primadona sektor pertanian.

Sedangkan sektor industri pengolahan sebagian besar adalah produksi kayu, dan seluruhnya merupakan industri pengolahan hasil hutan dengan bahan baku berasal dari hutan industri di Kabupaten Siak sendiri maupun dari daerah lain di luar Kabupaten Siak.

e. Komitmen Pemerintah Daerah terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN.

Pada masa lalu masalah hukum dan politik telah disalahgunakan sebagai alat untuk mempertahankan kekuasaan dan memperjuangkan kepentingan elit, pelaku ekonomi tertentu. Masalah hukum dan penyelenggaraan pemerintahan telah merugikan kepentingan masyarakat secara luas, sehingga penegakan hukum dan penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan berwibawa sulit untuk ditegakan.

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 relatif lebih mudah menentukan berbagai kelembagaan strategis pemerintah daerah. Pemerintah Kabupaten Siak mempunyai komitmen untuk mewujudkan adanya suatu pemerintahan yang baik, sebagai upaya perbaikan kinerja aparatur pemerintahan dan kelembagaan daerah sesuai dengan kewenangan yang dimiliki serta untuk menyikapi tuntutan masyarakat atas transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah dan tuntutan persaingan dalam era globalisasi.

f. Kondisi Keamanan Yang Kondusif.

Kondisi keamanan yang sangat kondusif sangat berpengaruh pada kehidupan sosial masyarakat, sehingga menjamin adanya iklim yang sehat di dalam pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan. Di samping itu juga sangat menunjang terhadap semakin semaraknya sektor publik di dalam berusaha maupun berinvestasi.

g. Tersedianya Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten.

Salah satu dokumen rencana yang harus dipedomani dalam perencanaan pembangunan di Kabupaten Siak adalah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRWK) yang telah disusun serta memiliki kekuatan hukum.

Pada dasarnya RTRWK dimaksudkan dalam rangka mewujudkan pemanfaatan ruang agar serasi dan seimbang sesuai dengan kebutuhan dan daya dukung wilayah serta penggunaan sumber daya yang tersedia. Secara substansial RTRWK dapat dipakai dalam menentukan arah pengembangan sosial, ekonomi, dan fisik searah dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai.

Dengan tersedianya RTRWK, Kabupaten Siak telah mengantisipasi dan siap melaksanakan pembangunan dengan segala kemampuan potensi dan daya dukung yang dimiliki, dengan tetap berpedoman pada konsep pembangunan berwawasan lingkungan yang berkelanjutan.

Faktor-faktor Kelemahan (*Weakness*) :

a. Rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia.

Sumber daya manusia merupakan sumber daya yang utama di dalam pembangunan. Bagaimanapun sempurnanya sebuah rencana dan strategi pembangunan dibuat, apabila tidak ditunjang oleh kemampuan sumber daya manusia maka hasilnya pun tidak akan optimal.

Di dalam era otonomi daerah serta menyongsong era perdagangan bebas, kompetisi sumber daya manusia akan menjadi sangat ketat. Kabupaten Siak masih dihadapkan pada kualitas sumber daya manusia yang masih rendah, sehingga kurang memiliki nilai tambah untuk mampu menjadi daerah yang mempunyai keunggulan kompetitif dalam persaingan global. Rendahnya kualitas sumber daya terukur dari masih rendahnya tingkat pendidikan dan penguasaan teknologi di kalangan masyarakat.

Untuk menciptakan nilai tambah dan keunggulan kompetitif, maka sedini mungkin harus dilakukan persiapan di dalam di dalam peningkatan kualitas terhadap sumber daya manusia.

b. Terbatasnya Infrastruktur dan sarana utilitas.

Infrastruktur merupakan hal vital yang mutlak diperlukan dalam pengembangan suatu daerah karena sangat berpengaruh dalam segala aspek kehidupan masyarakat maupun aktivitas perekonomian di berbagai sektor.

Pada lingkungan internal, masih terdapat daerah-daerah yang masih terisolir dan belum terjangkau, serta belum lancarnya akses ke daerah-daerah kawasan strategis dan cepat tumbuh maupun akses dari desa-desa potensial ke pasar. Di lain pihak dilihat dari lingkungan eksternal, Kabupaten Siak merupakan daerah transit yang penting antara Riau Daratan dan Riau Kepulauan dengan peluang makin besarnya frekwensi lalu-lintas antara Propinsi Riau dan Propinsi Kepulauan Riau yang melewati Kabupaten Siak.

Kondisi pada saat ini menggambarkan, bahwa jaringan infrastruktur yang ada belum dapat mengimbangi semakin tingginya tingkat aksesibilitas, arah dan laju perkembangan sentra-sentra pertumbuhan ekonomi baik yang ada di Kabupaten Siak sendiri maupun di wilayah sekitar sebagai *hinterland*.

Selanjutnya di Kabupaten Siak juga sangat terbatas sarana utilitas, seperti sarana listrik, air bersih/air minum dan telekomunikasi.

c. Masyarakat belum siap menghadapi pasar global.

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah berkembang dengan pesat, sehingga komunikasi dan interaksi menjadi bersifat global tanpa lagi terhambat oleh batasan ruang dan waktu. Kabupaten Siak dihadapkan pada kondisi kesiapan berbagai sumber daya, baik sumber daya manusia secara mental dan fisik, aparatur pemerintah, maupun sumber daya alam, untuk menghadapi gelombang persaingan, investasi dan pergeseran budaya.

Dengan akan diberlakukannya zona perdagangan bebas (AFTA), merupakan tantangan bagi Kabupaten Siak untuk mengelola produk-produk unggulan dan kompetitif.

Namun demikian dengan melihat tingkat kemampuan dan kualitas sumber daya manusia, teknologi yang dimanfaatkan, dan jiwa kewira-usahaan, menunjukkan bahwa masyarakat belum siap di dalam menghadapi era persaingan bebas yang terkenal dengan istilah pasar global.

d. Manajemen aparatur pemerintah belum baik.

Pemberlakuan Undang Undang Nomor 22 tahun 1999 menganut asas desentralisasi yang memberi kesempatan dan keleluasaan bagi daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Eksistensi Kabupaten Siak sebagai daerah otonom mempunyai kewenangan untuk membentuk dan melaksanakan kebijakan menurut prakarsa dan aspirasi masyarakat secara luas, nyata dan bertanggungjawab, sesuai dengan kewenangan yang ditetapkan.

Untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab serta kewenangan yang semakin luas dalam menghadapi era reformasi, diperlukan fungsi kelembagaan yang efektif dan efisien serta aparatur pemerintah yang berkualitas, dengan sikap dan perilaku yang berintikan pengabdian, kejujuran, tanggungjawab, disiplin, memiliki integritas moral dan profesional.

Kenyataan yang dijumpai pada saat ini adalah struktur organisasi yang belum menerapkan sistem minim struktur dan kaya fungsi, sehingga kegiatan pemerintahan belum dapat berjalan secara efisien. Kurangnya kemampuan dan kemauan aparat untuk memahami dan mengaplikasikan TUPOKSI, sehingga keberadaannya belum benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Di samping itu pendelegasian wewenang yang tidak jelas akan mengakibatkan pertanggung-jawaban yang kurang memadai. Hal tersebut di samping karena tidak berfungsinya sistem pengendalian manajemen, juga sebagai akibat dari penempatan personil yang belum disesuaikan dengan kompetensi, keahlian dan latar belakang.

e. Masih terdapatnya desa miskin dan terisolir.

Kabupaten Siak sebagai kabupaten yang baru selain menghadapi tugas dan tanggungjawab sesuai dengan Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 25 tahun 1999, maka permasalahan obyektif dalam mengagendakan program dan kegiatan pembangunan daerah adalah kondisi geografis dan keadaan alam yang spesifik, yang belum seluruhnya tersentuh oleh kegiatan pembangunan masa sebelumnya.

Kondisi yang sedang dihadapi adalah masih terdapat daerah-daerah yang masih terisolir dan belum terjangkau, serta belum lancarnya akses ke daerah-daerah kawasan strategis dan cepat tumbuh maupun akses dari desa-desa potensial ke pasar. Hal ini menimbulkan kesenjangan ekonomi antar daerah, serta kurang lancarnya mobilitas barang dan orang antar satu daerah ke daerah lainnya.

f. Terbatasnya sumber dana

Sejalan dengan bergulirnya otonomi daerah, maka daerah mempunyai hak, wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Agar dapat meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, maka kepada daerah diberikan sumber-sumber pembiayaan yang cukup.

Mengingat keadaan dan kebutuhan daerah, maka kepada daerah diwajibkan untuk menggali segala sumber keuangannya sendiri. Masalah yang dihadapi adalah belum terbentuknya kapasitas sumber-sumber pendapatan daerah yang dapat digali sesuai pasal 74 UU No. 22 Tahun 1999, sehingga berpengaruh terhadap kemampuan daerah untuk menyediakan dana pembangunan daerah. Sumber dana yang ada belum dapat mencukupi kebutuhan pembiayaan pembangunan yang jumlahnya sangat besar.

2. Kondisi Lingkungan Eksternal

Uraian mengenai kondisi lingkungan eksternal ini meliputi peluang (*Oportunities*) dan tantangan/ancaman (*Threats*) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Siak. Yang dimaksud dengan peluang di sini adalah potensi dan keadaan yang ada di luar kendali Pemerintah Kabupaten Siak, yaitu berupa peluang-peluang yang berada di lingkungan eksternal yang diharapkan dapat menunjang dan diraih untuk memperlancar pelaksanaan program pembangunan Kabupaten Siak.

Sedangkan yang dimaksud dengan tantangan/ancaman adalah segala sesuatu yang berada di luar kendali Pemerintah Kabupaten Siak, yang dipandang dapat mengancam eksistensi dan menghambat kelancaran pelaksanaan program pembangunan daerah Kabupaten Siak.

Faktor-faktor Peluang (*Oportunities*) :

- a. Pemberlakuan Otonomi Daerah sesuai UU No. 22 Tahun 1999 dan UU No. 25 Tahun 1999.

Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, telah memberikan kewenangan otonomi kepada setiap daerah secara luas, nyata dan bertanggung jawab. Dalam undang-undang ini, daerah mempunyai kewenangan untuk menyelenggarakan persoalan-persoalan pembiayaan, perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi hasil pembangunan sesuai dengan standar, norma dan kebijakan pemerintah kecuali kewenangan di bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal serta agama.

Dengan adanya pemberlakuan otonomi daerah ini merupakan kesempatan bagi Kabupaten Siak untuk menentukan arah pembangunan yang lebih aspiratif dan partisipatif.

- b. Perkembangan IPTEK yang sangat pesat

Kemampuan aparat dan sumber daya manusia sangat berkaitan erat dengan tingkat pendidikan dan pelatihan yang telah diikuti. Pada pembangunan sumber daya manusia, pendidikan memegang peranan yang sangat strategis. Melalui pendidikan diharapkan terjadi peningkatan kualitas sumber daya manusia, baik sebagai insane maupun sebagai sumber daya pembangunan yang memiliki kemampuan memanfaatkan, mengembangkan dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pendayagunaan dan penguasaan IPTEK adalah untuk mengoptimalkan kemampuan sumber daya pembangunan serta meningkatkan nilai tambah sosial ekonomi dan peningkatan pendapatan daerah.

- c. Globalisasi di bidang perdagangan dan investasi

Kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi telah mendorong terjadi perubahan dalam berbagai segi kehidupan. Banyak perubahan mendasar yang perlu kita cermati dalam pelaksanaan pembangunan daerah, seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Fenomena tersebut menyebabkan batas antar beberapa negara menjadi tidak ada lagi. Dengan diberlakukannya pasar bebas, maka arus barang dan jasa serta kegiatan investasi tidak lagi dapat dibatasi oleh wilayah suatu teritorial tertentu. Untuk itu bagi Kabupaten Siak yang memiliki kedudukan strategis baik di kawasan Regional, Nasional maupun Internasional, dengan sumber daya dan berbagai sektor unggulan yang dimiliki, maka mempunyai peluang untuk bersaing dengan daerah/negara lain di dalam memasuki pasar bebas.

d. Tuntutan masyarakat terhadap transparansi dan akuntabilitas di dalam kebijakan publik

Sejak bergulirnya arus reformasi, terjadi banyak perubahan di berbagai sektor dan sendi kehidupan. Perubahan paradigma juga terjadi di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Masyarakat sekarang semakin tahu dan paham akan hak-haknya, dan kinerja pemerintah sendiri banyak menjadi sorotan.

Masyarakat menginginkan adanya partisipasi di dalam pelaksanaan pembangunan, agar kehendak dan peran serta dari masyarakat dapat terakomodasi. Di samping itu transparansi dan akuntabilitas di dalam kebijakan dan pelaksanaan pembangunan sangat diharapkan. Hal tersebut ingin diwujudkan dengan maksud agar kebijakan dan pelaksanaan pembangunan beserta pemanfaatannya dapat dipantau masyarakat serta dapat dipertanggungjawabkan. Karena pemerintahan yang baik dapat dicapai apabila terpenuhi ketiga pilar utama, yaitu : transparansi, partisipatif, dan akuntabilitas.

Faktor-faktor tantangan/ancaman (*Threats*) :

a. Prilaku Eksploitatif terhadap sumber daya yang mengancam pelestarian lingkungan hidup dan menimbulkan kerusakan ekosistem.

Kabupaten Siak, sebagai kabupaten baru ingin memacu agar pelaksanaan pembangunan dan pengembangan wilayah dapat berjalan secara optimal. Namun demikian percepatan pembangunan di berbagai sektor terutama yang berkenaan dengan pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah memiliki potensi terhadap timbulnya kerawanan di dalam pelestarian lingkungan hidup dan ekosistem. Hal tersebut tampak dengan beralih-fungsinya lahan-lahan produktif, baik berupa lahan pertanian, lahan perkebunan, maupun hutan produksi.

Dengan demikian agar mengantisipasi bahwa setiap pelaksanaan pembangunan tetap berpedoman pada konsep pembangunan berwawasan lingkungan yang berkelanjutan, serta meminimalisir beralih-fungsinya lahan-lahan produktif.

b. Pangsa pasar dan daya saing dari produk tertentu dikuasai oleh daerah/negara lain.

Suatu kendala yang dihadapi oleh Kabupaten Siak, diantaranya adalah kesulitan di dalam memasarkan hasil produksi karena tidak memiliki akses ke pasar. Pangsa pasar dikuasai oleh produk-produk dari luar daerah, karena hasil produksi terutama dari sub sektor industri kecil, pertanian tanaman pangan, perkebunan, dan peternakan kalah bersaing dengan produk-produk yang berasal dari daerah/negara lain.

Hal tersebut memerlukan rekayasa teknologi tepat guna, di samping peningkatan kemampuan SDM dan manajemen, agar produk yang dihasilkan mempunyai keunggulan serta daya saing.

c. Arus migrasi yang tidak terkendali

Kabupaten Siak sebagai daerah yang sedang berkembang seiring dengan makin lancarnya transportasi, akan membuka peluang usaha dan lapangan kerja bagi masyarakat luas. Hal ini akan berakibat pada arus migrasi yang semakin meningkat, sehingga kehidupan sosial masyarakat Siak akan semakin kompleks. Dampak lebih lanjut adalah menyangkut penyediaan berbagai fasilitas umum, maupun fasilitas ekonomi yang dibutuhkan penduduk seperti perumahan, pendidikan, kesehatan, tempat usaha, lapangan kerja dan lain sebagainya.

B. FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN

Faktor-faktor penentu keberhasilan adalah serangkaian asumsi mengenai kondisi yang perlu diciptakan dalam menjamin keberhasilan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan lima tahunan daerah. Dalam konteks ini, faktor penentu keberhasilan tersebut antara lain adalah sebagai berikut :

1. Adanya iklim investasi yang kondusif.
2. Adanya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia.
3. Adanya peningkatan kemampuan dan kapasitas pelayanan Lembaga dan Aparatur Pemerintah Daerah kepada masyarakat.
4. Adanya peningkatan kemampuan keuangan dan pembiayaan pembangunan daerah.
5. Adanya upaya nyata memberantas KKN.
6. Adanya upaya nyata pengendalian potensi dan pengelolaan sda yang berwawasan lingkungan.
7. Adanya hubungan yang harmonis antara Eksekutif, Legislatif, Yudikatif, dan masyarakat.
8. Pola hubungan koordinasi vertikal yang harmonis antara kabupaten dengan provinsi sehingga memungkinkan terciptanya sinergi kebijakan dan sinkronisasi program.
9. Tetap berlakunya UU No. 22 Tahun 1999 dan UU No. 25 Tahun 1999.
10. Berkurangnya angka kemiskinan dan pengangguran

BAB V TUJUAN DAN SASARAN

A. TUJUAN

Tujuan adalah penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yaitu merupakan arah strategik organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin diciptakan serta merupakan hasil akhir yang ingin dicapai dalam kurun waktu perencanaan jangka menengah. Tujuan ditetapkan berdasarkan faktor-faktor penentu keberhasilan yang telah ditetapkan sebelumnya, dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki.

Dengan mendasarkan kepada faktor-faktor penentu keberhasilan berarti organisasi telah memperhitungkan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki, sehingga tujuan yang ditetapkan menjadi lebih rasional.

1. Misi pertama : Mengembangkan dan meningkatkan Sumber Daya Manusia profesional yang dilandasi keimanan dan ketaqwaan, serta penguasaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dalam lingkungan nilai-nilai Budaya Melayu, dengan tujuan :
 - a. Mewujudkan pendidikan berkualitas yang dapat memenuhi kebutuhan SDM bagi pembangunan Kabupaten Siak.
 - b. Melestarikan nilai-nilai budaya Melayu dalam kehidupan bermasyarakat.
 - c. Melaksanakan pembinaan kegiatan pemuda dalam segala aspek sehingga meningkatnya fungsi dan peran pemuda dalam pembangunan.
 - d. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
 - e. Meningkatkan produktivitas, kreatifitas, daya inovasi, keterampilan, kemandirian dan daya saing tenaga kerja.
 - f. Meningkatkan penghayatan dan pengamalan ajaran agama oleh setiap anggota masyarakat.
 2. Misi ke dua : Meningkatkan kemampuan dan kapasitas Pemerintah Daerah demi terwujudnya pemerintahan yang baik (*Good Governance*), dengan tujuan :
 - a. Mewujudkan tertib administrasi kependudukan.
 - b. Meningkatkan kinerja dan produktivitas aparatur pemerintah yang profesional.
 - c. Meningkatkan kualitas pelaksanaan dan akuntabilitas pembangunan.
-

- d. Menciptakan penegakan supremasi hukum dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Siak.
 - e. Meningkatkan kemampuan aparaturnya dalam penguasaan dan pemanfaatan IPTEK.
 - f. Meningkatkan peran-serta masyarakat dan pihak swasta dalam pembangunan Kabupaten Siak.
3. Misi ke tiga : Memberdayakan masyarakat dan seluruh kekuatan ekonomi daerah dengan memperkuat struktur perekonomian berbasis kerakyatan yang bertumpu pada agribisnis dan agroindustri, dengan tujuan :
- a. Mempercepat pemulihan ekonomi melalui pengembangan usaha ekonomi kerakyatan.
 - b. Memperluas jaringan pemasaran produk yang dihasilkan Kabupaten Siak.
 - c. Meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi pertanian.
 - d. Meningkatkan taraf hidup petani dan nelayan.
 - e. Mewujudkan terpeliharanya fungsi hutan.
 - f. Meningkatkan penerimaan asli daerah Kabupaten Siak.
 - g. Mewujudkan peningkatan investasi di Kabupaten Siak.
 - h. Mewujudkan partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan sosio-ekonomi.
4. Misi ke empat : Mengembangkan dan meningkatkan infrastruktur daerah yang mendukung peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan daerah yang berkelanjutan, dengan tujuan :
- a. Mewujudkan kawasan strategis bebas banjir serta menyediakan infrastruktur yang mendukung sektor pertanian dan penyediaan air baku.
 - b. Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur transportasi darat dan air yang mendukung kelancaran investasi, produksi dan pemasaran hasil-hasilnya.
 - c. Meningkatkan kualitas perumahan dan permukiman masyarakat serta penyehatan lingkungan permukiman.
 - d. Mengendalikan kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup.
 - e. Menciptakan pengembangan wilayah yang terpadu dan terencana sesuai peruntukannya dengan berorientasi pada sungai sebagai waterfront public.
 - f. Mewujudkan peningkatan kunjungan wisatawan domestik dan asing ke Kabupaten Siak.
 - g. Memperluas jangkauan layanan listrik, air bersih dan telekomunikasi.

B. SASARAN

Sasaran merupakan penjabaran dari setiap tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam kurun jangka waktu menengah yang dialokasikan dalam periode tahunan. Fokus utama penentu sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya dalam kegiatan operasional setiap tahun.

Sasaran adalah suatu bagian integral dari proses perencanaan strategis, dan merupakan dasar yang kuat untuk mengendalikan dan memantau pencapaian kinerja serta lebih menjamin suksesnya pelaksanaan rencana jangka panjang yang sifatnya menyeluruh.

Sesuai dengan urutan misi, adapun sasaran yang hendak diwujudkan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, adalah sebagai berikut :

Misi Pertama : Mengembangkan dan meningkatkan Sumber Daya Manusia professional yang dilandasi keimanan dan ketaqwaan, serta penguasaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dalam lingkungan nilai-nilai Budaya Melayu.

1. Tujuan mewujudkan pendidikan berkualitas yang dapat memenuhi kebutuhan SDM bagi pembangunan Kabupaten Siak, adalah dengan sasaran :
 - a. Meningkatnya kualitas manajemen pendidikan.
 - b. Tersedianya kurikulum pendidikan berkualitas yang bernuansa budaya Melayu.
 - c. Meningkatnya kualitas guru.
 - d. Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pendidikan.
-

2. Tujuan melestarikan nilai-nilai budaya Melayu dalam kehidupan bermasyarakat, adalah dengan sasaran :
 - a. Lestari dan berkembangnya budaya daerah Melayu.
 - b. Tergali, lestari, dan tersosialisasinya sejarah Melayu.
3. Tujuan melaksanakan pembinaan kegiatan pemuda dalam segala aspek sehingga meningkatnya fungsi dan peran pemuda dalam pembangunan, adalah dengan sasaran :
 - a. Terbentuknya klub-klub olah raga yang profesional.
 - b. Terbentuknya sistem pembinaan bibit olahragawan/wati.
 - c. Tersedianya sarana dan prasarana pembinaan pemuda dan olahraga yang mendukung prestasi pemuda dan olah raga.
 - d. Terhindarnya pemuda dari bahaya penyakit masyarakat.
4. Tujuan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, adalah dengan sasaran :
 - a. Menurunnya tingkat penyakit epidemi dan penyakit-penyakit lingkungan serta penyakit menular.
 - b. Meningkatnya umur harapan hidup masyarakat.
 - c. Menurunnya angka kesakitan dan kematian.
 - d. Meningkatnya kesadaran masyarakat akan hidup sehat.
 - e. Meningkatnya status gizi masyarakat.
 - f. Meningkatnya sarana dan prasarana kesehatan.
5. Tujuan meningkatkan produktivitas kreatifitas, daya inovasi, keterampilan, kemandirian dan daya saing tenaga kerja, adalah dengan sasaran :
 - a. Terciptanya tenaga kerja berkualitas yang terampil, professional dan kompetitif melalui sistem pembinaan yang terstruktur.
 - b. Terciptanya tenaga kerja berkualitas yang aktif dan mandiri menciptakan lapangan kerja baru.
6. Tujuan meningkatkan penghayatan dan pengamalan ajaran agama oleh setiap anggota masyarakat, adalah dengan sasaran :
 - a. Tersedia dan tersebarny da'i, qadhi, dan guru agama yang berkualitas.
 - b. Menurunnya kasus-kasus kriminal, KKN, dan tindak amoral lainnya.
 - c. Terbinanya lembaga-lembaga keagamaan secara terus-menerus.
 - d. Tersedianya sarana dan prasarana ibadah yang memadai.

Misi Ke-dua : Meningkatkan kemampuan dan kapasitas Pemerintah Daerah demi terwujudnya pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

1. Tujuan mewujudkan tertib administrasi kependudukan dan pelayanan publik, adalah dengan sasaran :
 - Tersedianya data dan pelayanan kependudukan yang cepat, tepat dan akurat.
 2. Tujuan meningkatkan kinerja dan produktivitas aparatur Pemerintah Daerah yang profesional, adalah dengan sasaran :
 - a. Terwujudnya kesesuaian antara kualifikasi SDM dengan formasi jabatan.
 - b. Meningkatnya kompetensi aparatur Pemerintah Daerah untuk melayani masyarakat secara professional.
 3. Tujuan meningkatkan kualitas pelaksanaan pembangunan, adalah dengan sasaran :
 - Meningkatnya efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pembangunan.
 4. Tujuan menciptakan penegakan supremasi hukum dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Siak, adalah dengan sasaran :
 - a. Meningkatnya aparatur dan masyarakat yang sadar hukum.
 - b. Tersedia dan terlaksananya Peraturan Daerah.
 - c. Terciptanya koordinasi antar instansi dalam rangka penegakan hukum.
-

5. Tujuan meningkatkan kemampuan aparaturnya dalam penguasaan dan pemanfaatan IPTEK, adalah dengan sasaran :
 - a. Berfungsinya sistem informasi yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan.
 - b. Meningkatnya pemanfaatan IPTEK.
6. Tujuan meningkatkan peran-serta masyarakat dan pihak swasta dalam pembangunan Kabupaten Siak, adalah dengan sasaran :
 - a. Meningkatnya penyebaran informasi pembangunan kepada masyarakat dan pihak swasta.
 - b. Meningkatnya partisipasi masyarakat terhadap perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan.

Misi Ke-tiga : Memberdayakan masyarakat dan seluruh kekuatan ekonomi daerah dengan memperkuat struktur perekonomian berbasis kerakyatan yang bertumpu pada agrobisnis dan agroindustri

1. Tujuan mempercepat pemulihan ekonomi melalui pengembangan usaha rakyat yang tangguh, adalah dengan sasaran :
 - Berkembangnya industri kecil, menengah, koperasi serta usaha kecil dan menengah yang mampu membuka peluang kerja baru.
2. Tujuan memperluas jaringan pemasaran dan distribusi barang di Kabupaten Siak, adalah dengan sasaran :
 - Dibangunnya jalur dan sistem distribusi yang menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Siak
3. Tujuan meningkatkan kuantitas dan kualitas produksi pertanian, adalah dengan sasaran :
 - Meningkatnya produktivitas pertanian berkualitas melalui optimalisasi pemanfaatan faktor-faktor produksi.
4. Tujuan meningkatkan taraf hidup petani dan nelayan, adalah dengan sasaran :
 - Meningkatnya pendapatan petani dan nelayan.
5. Tujuan mewujudkan terpeliharanya fungsi hutan, adalah dengan sasaran :
 - a. Berkurangnya lahan kritis.
 - b. Mempertahankan kelestarian hutan.
6. Tujuan meningkatkan penerimaan asli daerah Kabupaten Siak, adalah dengan sasaran:
 - Bertambahnya objek pajak dan retribusi daerah.
7. Tujuan mewujudkan peningkatan investasi di Kabupaten Siak, adalah dengan sasaran:
 - Meningkatnya jumlah investor.
8. Tujuan mewujudkan partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan sosio-ekonomi, adalah dengan sasaran :
 - Meningkatnya kemandirian masyarakat dalam pembangunan.

Misi Ke-empat : Mengembangkan dan meningkatkan infrastruktur daerah yang mendukung peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan daerah yang berkelanjutan

1. Tujuan mewujudkan kawasan strategis bebas banjir serta menyediakan infrastruktur yang mendukung sektor pertanian dan penyediaan air baku, adalah dengan sasaran :
 - a. Terpeliharanya sarana dan prasarana sumber-sumber air melalui pendekatan terpadu dan terkoordinasi.
 - b. Terbangun dan terpeliharanya jaringan pengairan untuk mendukung sektor pertanian dan sektor lainnya.
 - c. Tersedianya air baku bagi masyarakat Kabupaten Siak.
-

2. Tujuan meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur transportasi darat dan air yang mendukung kelancaran investasi, produksi dan pemasaran hasil-hasilnya, adalah dengan sasaran :
 - Tersedianya prasarana transportasi darat dan air yang aman dan nyaman yang menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Siak
3. Tujuan meningkatkan kualitas perumahan dan permukiman masyarakat serta penyehatan lingkungan permukiman, adalah dengan sasaran :
 - a. Tersedianya sarana serta prasarana perumahan dan permukiman di pedesaan dan perkotaan yang memenuhi aspek kesehatan lingkungan.
 - b. Tersedianya sarana dan prasarana lingkungan permukiman di pedesaan dan perkotaan yang memenuhi aspek kesehatan lingkungan.
 - c. Tersedianya sarana dan prasarana air bersih di pedesaan dan perkotaan.
 - d. Meningkatnya jumlah konsumen yang mendapatkan pelayanan air bersih.
4. Tujuan mengendalikan kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup, adalah dengan sasaran :
 - Menurunnya tingkat pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup Kabupaten Siak.
5. Tujuan menciptakan pengembangan wilayah yang terpadu dan terencana sesuai peruntukannya, adalah dengan sasaran :
 - Terwujudnya penataan ruang wilayah Kabupaten Siak yang komprehensif dan terintegrasi.
6. Tujuan mewujudkan peningkatan kunjungan wisatawan domestik dan asing ke Kabupaten Siak, adalah dengan sasaran :
 - a. Tersedianya sarana dan prasarana penunjang pariwisata yang memadai.
 - b. Meningkatnya kunjungan wisatawan domestik dan manca negara ke Kabupaten Siak.
 - c. Meningkatnya PAD dari sektor pariwisata.
7. Tujuan memperluas jangkauan layanan listrik, adalah dengan sasaran :
 - Meningkatnya jumlah konsumen yang mendapatkan pelayanan listrik.

BAB VI STRATEGI PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN

Seperti telah dijelaskan pada bab sebelumnya, untuk mencapai visi yang telah ditetapkan, Kabupaten Siak mempunyai misi sebagai berikut :

- 1. Mengembangkan dan meningkatkan Sumber Daya Manusia professional yang dilandasi keimanan dan ketaqwaan, serta penguasaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dalam lingkungan nilai-nilai Budaya Melayu.**
 - 2. Meningkatkan kemampuan dan kapasitas Pemerintah Daerah demi terwujudnya pemerintahan yang baik (*Good Governance*).**
 - 3. Memberdayakan masyarakat dan seluruh kekuatan ekonomi daerah dengan memperkuat struktur perekonomian berbasis kerakyatan yang bertumpu pada agrobisnis dan agroindustri.**
 - 4. Mengembangkan dan meningkatkan infrastruktur daerah yang mendukung peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan daerah yang berkelanjutan.**
-

A. KEBIJAKAN, PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PELAKSANAAN MISI PERTAMA

Untuk melaksanakan misi pertama “Mengembangkan dan meningkatkan Sumber Daya Manusia professional yang dilandasi keimanan dan ketaqwaan, serta penguasaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dalam lingkungan nilai-nilai Budaya Melayu”, dalam lima tahun ke depan, ditetapkan arah kebijakan, program dan kegiatan prioritas lima tahunan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh daerah yaitu :

1. BIDANG KEWENANGAN WAJIB

1.1. Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga

1) Sub Bidang Pendidikan

a) Isu Strategis

- (1) Masih rendahnya kualitas pendidikan.
- (2) Masih terbatasnya sarana dan prasarana di bidang pendidikan umum, kejuruan dan luar sekolah.
- (3) Masih belum tertampungnya anak usia sekolah.
- (4) Rendahnya kemampuan ekonomi sebagian masyarakat untuk menunjang pendidikan.
- (5) Belum adanya keterkaitan dan kesesuaian (link and match) antara produk pendidikan dengan kebutuhan tenaga kerja.

b) Arah Kebijakan

- (1) Perluasan dan pemerataan kesempatan mengenyam pendidikan yang berkualitas bagi seluruh masyarakat.
- (2) Pengembangan sekolah unggulan.
- (3) Penumbuhan sekolah model terpadu.

c) Program dan Kegiatan Pembangunan

- (1) Program Pendidikan Dasar dan Prasekolah, dengan kegiatan :
 - (a) Pembangunan dan revitalisasi tingkat pendidikan dasar (SD/MI dan SLTP/MTs).
 - (b) Perbaikan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendidikan dasar (SD/MI dan SLTP/MTs).
 - (c) Peningkatan mutu pendidikan dasar dan prasekolah.
 - (d) Pengembangan sekolah unggul tingkat pendidikan dasar.
 - (e) Pendirian Sekolah Model Terpadu tingkat Pendidikan Dasar.
 - (f) Pembangunan dan pengembangan sekolah TK Binaan Pemda.
 - (g) Peningkatan kualitas guru melalui pendidikan lanjutan, training atau magang.
 - (2) Program Pendidikan Menengah, dengan kegiatan :
 - (a) Peningkatan pembangunan pendidikan dan rehabilitasi sekolah menengah (SMU/SMK/MA).
 - (b) Perbaikan/rehabilitasi sarana dan prasarana sekolah menengah (SMU/SMK/MA).
 - (c) Peningkatan mutu pendidikan menengah (SMU/SMK/MA).
 - (d) Pengembangan sekolah unggul tingkat pendidikan Menengah.
 - (e) Pengembangan Sekolah Model Terpadu tingkat Pendidikan Menengah.
 - (3) Program Sinkronisasi Dan Koordinasi Pembangunan Pendidikan Nasional, dengan kegiatan :
 - (a) Perbaikan kurikulum lokal pendidikan dasar dan menengah sehingga memenuhi kebutuhan SDM pembangunan daerah menuju masyarakat agamis.
-

- (b) Pemberian bantuan beasiswa bagi pelajar dan mahasiswa berprestasi dan atau kurang mampu.
- (c) Pemberian bantuan beasiswa bagi guru-guru berprestasi untuk mengikuti pendidikan lanjutan.

- (4) Program Pendidikan Luar Sekolah, dengan kegiatan :
 - (a) Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan luar sekolah.
 - (b) Peningkatan mutu pendidikan luar sekolah.
 - (c) Kejar paket A dan sejenisnya.

2) Sub Bidang Kebudayaan Nasional

- a) Isu Strategis
 - (1) Belum berkembangnya kualitas kinerja lembaga kebudayaan.
 - (2) Belum tersedianya sarana dan prasarana yang mendukung pelestarian budaya.
 - (3) Kurangnya minat generasi muda untuk menghayati dan melestarikan nilai-nilai budaya Melayu
- b) Arah Kebijakan
Menggali potensi dan melestarikan budaya asli daerah yang diintegrasikan dengan pariwisata guna menangkal eksek negatif penetrasi budaya asing.
- c) Program dan Kegiatan Pembangunan
Program Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan, dengan kegiatan:
 - (1) Studi penulisan sejarah dan budaya Kerajaan Siak Sri Indrapura.
 - (2) Penumbuhan dan pengembangan sanggar seni dan budaya daerah.

3) Sub Bidang Pemuda dan Olah Raga.

- a) Isu Strategis
Belum memadainya sarana dan prasarana pembinaan pemuda dan olahraga yang mendukung prestasi pemuda dan olah raga.
- b) Arah Kebijakan
Pembinaan kepemudaan dan olahraga.
- c) Program dan Kegiatan Pembangunan
 - (1) Program Peningkatan Partisipasi Pemuda, dengan kegiatan:
 - (a) Pembinaan Kepemudaan.
 - (2) Program Pemasarakatan Olah Raga dan Kesegaran Jasmani, dengan kegiatan:
 - (a) Pembangunan sarana dan prasarana olahraga.
 - (3) Program Pemanduan Bakat, Pembibitan dan Peningkatan Prestasi Olahraga, dengan kegiatan :
 - (a) Pengembangan olahraga untuk peningkatan prestasi.
 - (b) Pembinaan olahraga unggulan dan berprestasi.

1.2. Bidang Kesehatan

- a) Isu Strategis
 - (1) Masih rendahnya kualitas kesehatan masyarakat.
 - (2) Masih terbatasnya sarana dan prasarana di bidang kesehatan.
 - (3) Masih terbatasnya kuantitas dan kualitas tenaga medis dan paramedis.
 - (4) Masih rendahnya produktivitas manajemen pelayanan kesehatan.
 - b) Arah Kebijakan
 - (1) Memelihara dan meningkatkan kesehatan individu, keluarga dan masyarakat.
 - (2) Membudayakan perilaku hidup bersih dan sehat.
-

- (3) Memelihara dan meningkatkan pelayanan kesehatan yang prima, merata dan terjangkau.
- (5) Program dan Kegiatan Pembangunan
- (1) Program Upaya Kesehatan, dengan kegiatan :
 - (a) Pencegahan dan pemberantasan penyakit.
 - (b) Peningkatan kesehatan lingkungan.
 - (c) Peningkatan mutu pelayanan kesehatan.
 - (d) Peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat.
 - (2) Program Perbaikan Gizi Masyarakat, dengan kegiatan :
 - (a) Peningkatan gizi masyarakat.
 - (3) Program Sumber Daya Kesehatan, dengan kegiatan :
 - (a) Peningkatan dan penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan masyarakat.
 - (b) Peningkatan kuantitas dan kualitas tenaga medis dan para medis.
 - (4) Program Kebijakan Manajemen dan Pembangunan Kesehatan dengan kegiatan :
 - (a) Pembangunan Rumah Sakit dan prasarana pelayanan kesehatan lainnya.
 - (b) Peningkatan fasilitas sarana pelayanan kesehatan masyarakat.

1.3. Bidang Kesejahteraan Sosial

- a) Isu Strategis
 - (1) Belum meratanya distribusi kesejahteraan masyarakat.
 - (2) Belum adanya pengendalian sosial kemasyarakatan yang merusak budaya melayu.
- b) Arah Kebijakan
 - (1) Pengendalian masalah sosial kemasyarakatan.
 - (2) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat
- c) Program dan Kegiatan Pembangunan
 - (1) Program Pengembangan Potensi Kesejahteraan Sosial, dengan kegiatan :
 - (a) Pembangunan sarana kesejahteraan sosial.
 - (2) Pengembangan keserasian kebijakan publik dan penanganan masalah sosial kemasyarakatan, dengan kegiatan :
 - (a) Peningkatan pelayanan penanggulangan dan rehabilitasi penyandang masalah sosial.
 - (3) Program Keluarga Berencana, dengan kegiatan :
 - (a) Peningkatan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi.

1.4. Bidang Tenaga Kerja

- a) Isu Strategis
 - (1) Tingginya tingkat pengangguran di Kabupaten Siak.
 - (2) Kualitas tenaga kerja melalui pendidikan sekolah dan pendidikan luar sekolah belum memiliki daya saing yang tinggi.
 - (3) Masih kurangnya perlindungan terhadap hak-hak mereka sebagai tenaga kerja dan sebagai makhluk sosial yang berbudaya dan beragama.
 - (4) Belum adanya perencanaan sumber daya manusia yang sesuai antara ketersediaan pasar tenaga kerja dengan ketersediaan lapangan pekerjaan.
- b) Arah Kebijakan
Peningkatan daya saing dan kemandirian tenaga kerja, perlindungan dan keberpihakan tenaga kerja.
- c) Program dan Kegiatan Pembangunan
 - (1) Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja, dengan kegiatan :
 - (a) Peningkatan daya saing dan kemandirian tenaga kerja.

- (2) Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Tenaga Kerja, dengan kegiatan :
 - (a) Perlindungan hak dan kewajiban pekerja.
 - (b) Pembinaan Lembaga Tenaga Kerja.

2. BIDANG KEWENANGAN LAIN

2.1. Bidang Keagamaan

- a) Isu Strategis
 - (1) Kurangnya jam pelajaran keagamaan dan tenaga pengajar pada setiap jenjang pendidikan formal.
 - (2) Belum meratanya kegiatan syiar keagamaan dalam rangka meningkatkan budi pekerti bagi masyarakat.
 - (3) Kurangnya peran lembaga agama dalam meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan agama guna membina kerukunan hidup umat beragama.
 - (4) Belum terlihat pengamalan agama dalam budaya kerja sehari-hari.
- b) Arah Kebijakan
Menciptakan SDM unggul yang bertaqwa kepada Tuhan YME.
- c) Program dan Kegiatan Pembangunan
 - (1) Program Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama, dengan kegiatan :
 - (a) Pembangunan Mesjid Kabupaten Siak.
 - (b) Pengembangan Islamic Center.
 - (2) Program Peningkatan Pemahaman dan Pengamalan Agama Serta Kerukunan Hidup Umat Beragama, dengan kegiatan :
 - (a) Pembinaan keagamaan dan kerukunan hidup beragama.
 - (b) Pembinaan da'i, qodhi, dan guru agama.
 - (3) Program Peningkatan Kualitas Pendidikan Agama, dengan kegiatan :
 - (a) Pembinaan pendidikan agama.

B. KEBIJAKAN, PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PELAKSANAAN MISI KEDUA

Untuk melaksanakan misi ke dua “**Meningkatkan kemampuan dan kapasitas Pemerintah Daerah demi terwujudnya pemerintahan yang baik (Good Governance)**” dalam lima tahun ke depan, ditetapkan arah kebijakan, program dan kegiatan prioritas lima tahunan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh daerah yaitu :

1. BIDANG KEWENANGAN WAJIB

1.1. Bidang Kependudukan

- a) Isu Strategis
 - (1) Penyebaran penduduk yang tidak merata.
 - (2) Belum adanya perencanaan pengendalian penduduk.
- b) Arah Kebijakan
 - (1) Penataan dan Pengendalian penduduk
- c) Program dan Kegiatan Pembangunan
 - (1) Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Kependudukan, dengan kegiatan :
 - (a) Pembinaan pelayanan kependudukan dan catatan sipil.

2. BIDANG KEWENANGAN LAIN

2.1. Bidang Aparatur Dan Pengawasan

- a) Isu Strategis
 - (1) Terbatasnya sarana dan prasarana yang mendukung kelancaran tugas-tugas di bidang aparatur pemerintah dan pengawasan dalam pembangunan dan pelayanan masyarakat.
 - (2) Masih belum meratanya jangkauan pelayanan pemerintah kepada masyarakat.
 - (3) Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada *Good Governance*.
 - (4) Kurangnya SDM aparatur pemerintah baik secara kuantitas maupun kualitas, untuk menunjang kegiatan pelayanan masyarakat.
 - (5) Masih lemahnya lembaga-lembaga yang berfungsi sebagai pengawasan dalam pembangunan.

- b) Arah Kebijakan
 - (1) Peningkatan kualitas aparatur pemerintah yang bersih dan berwibawa.
 - (2) Peningkatan sarana dan prasarana pemerintah.
 - (3) Peningkatan efisiensi dan efektifitas pembangunan.

- c) Program dan Kegiatan Pembangunan
 - (1) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia, dengan kegiatan :
 - (a) Peningkatan sumber daya aparatur pemerintah.
 - (b) Analisa jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Siak.
 - (4) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemerintah, dengan kegiatan :
 - (a) Pembangunan kantor pemerintah.
 - (b) Pembangunan rumah jabatan aparatur pemerintah.
 - (c) Peningkatan prasarana fisik pamong praja dan aparatur.
 - (d) Peningkatan sarana dan prasarana pemerintahan desa dan kelurahan.
 - (e) Peningkatan sarana mobilitas dan fasilitas kantor pemerintah.
 - (5) Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, dengan kegiatan :
 - (a) Perencanaan umum pembangunan Kabupaten Siak.
 - (b) Pembinaan dan pengendalian administrasi pembangunan daerah.
 - (c) Pembangunan prasarana dan sistem pelayanan satu atap.
 - (d) Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Daerah
 - (6) Program Pengawasan Aparatur Daerah, dengan kegiatan :
 - (a) Pengawasan aparatur dan pembangunan daerah.

2.2. BIDANG HUKUM

- a) Isu Strategis
 - (1) Belum tegaknya supremasi hukum.
 - (2) Kurangnya sarana dan prasarana dalam melaksanakan penegakan hukum.

 - b) Arah Kebijakan
 - Peningkatan kesadaran dan penegakan hukum dalam rangka menumbuhkan supremasi hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

 - c) Program dan Kegiatan Pembangunan
 - (1) *Program Peningkatan Kesadaran Hukum dan Pengembangan Budaya Hukum, dengan kegiatan :*
 - (a) Sosialisasi dan penyuluhan hukum/perundang-undangan kepada aparatur pemerintah dan masyarakat.
 - (b) Penyusunan produk-produk hukum yang berorientasi pada penegakan hukum.
 - (c) Pengangkatan dan peningkatan jumlah penegak hukum Peraturan Daerah.
-

2.3. Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

- a) Isu Strategis
 - (1) Belum terealisasinya alih teknologi tepat guna dibidang unggulan.
 - (2) Adanya ketimpangan kemampuan penguasaan IPTEK.
- b) Arah Kebijakan
 - (1) Peningkatan sistem informasi daerah.
 - (2) Peningkatan penguasaan dan pemanfaatan IPTEK dalam semua aspek pembangunan.
- c) Program dan Kegiatan Pembangunan
 - (3) Program Peningkatan Kapasitas dan Pengembangan Kemampuan Sumber Daya IPTEK, dengan kegiatan :
 - (a) Pengembangan sistem informasi manajemen.
 - (4) Program Peningkatan Kemandirian dan Keunggulan IPTEK, dengan kegiatan :
 - (a) Penelitian dan perencanaan ekonomi dan keuangan.
 - (b) Penelitian dan perencanaan sumber daya manusia dan kesejahteraan sosial.
 - (c) Penelitian dan perencanaan infrastruktur dan pengembangan Wilayah
 - (d) Kajian pemetaan potensi pertanian dan ketahanan pangan di Kabupaten Siak.
 - (e) Kajian pengembangan pertanian tanaman pangan dan hortikultura.
 - (f) Kajian potensi pasar komoditi-komoditi pertanian secara umum (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan, kehutanan dan sebagainya) untuk Kabupaten Siak.
 - (g) Inventarisasi potensi sumber daya mineral dan energi.
 - (5) Program penyempurnaan dan pengembangan statistik, dengan kegiatan :
 - (a) Pengembangan data base.

2.4. Bidang Politik, Informasi dan Komunikasi

- a) Isu Strategis
 - (1) Terbatasnya sarana dan prasarana yang mendukung kelancaran tugas tugas dibidang penerangan dan media massa dalam pembangunan dan pelayanan masyarakat.
 - (2) Belum terlaksananya dengan baik pembinaan politik, guna terwujudnya kehidupan demokrasi.
- b) Arah Kebijakan
 - (1) Peningkatan transparansi pelaksanaan pembangunan.
 - (2) Peningkatan suasana kehidupan demokratis guna menunjang kualitas pembangunan.
- c) Program dan Kegiatan Pembangunan
 - (3) Program Peningkatan Prasarana Penyiaran dan Media Massa, dengan kegiatan:
 - (a) Peningkatan sarana komunikasi informasi dan dokumentasi pemerintah daerah.
 - (2) Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Pembangunan, dengan kegiatan :
 - (a) Pengembangan informasi pembangunan daerah.
 - (3) Program Pengembangan Budaya Politik, dengan kegiatan :
 - (a) Pembinaan dan pemberdayaan politik masyarakat.

2.5. BIDANG PERTAHANAN DAN KEAMANAN

- a) Isu Strategis
 - (1) Terbatasnya sarana dan prasarana yang mendukung kelancaran tugas tugas dibidang keamanan masyarakat.
-

- b) Arah Kebijakan
 - (1) Peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung kelancaran tugas-tugas di bidang keamanan masyarakat.
 - (2) Peningkatan rasa aman bagi masyarakat Kabupaten Siak khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya.
- c) Program dan Kegiatan Pembangunan
 - (1) Program Pengembangan Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, dengan kegiatan :
 - (a) Peningkatan sarana dan prasarana keamanan masyarakat.
 - (b) Peningkatan Pembinaan Sistem Keamanan Lingkungan.

C. KEBIJAKAN, PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PELAKSANAAN MISI KE TIGA

Untuk melaksanakan misi ke tiga “**Memberdayakan masyarakat dan seluruh kekuatan ekonomi daerah dengan memperkuat struktur perekonomian berbasis kerakyatan yang bertumpu pada agrobisnis dan agroindustri**” dalam lima tahun ke depan, ditetapkan arah kebijaksanaan, program dan kegiatan prioritas lima tahunan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh daerah yaitu :

1. BIDANG KEWENANGAN WAJIB

1.1. Bidang Industri dan Perdagangan

- a) Isu Strategis
 - (1) Lemahnya faktor-faktor produksi, sistem distribusi dan pemasaran pada industri kecil.
 - (2) Adanya ketimpangan struktur industri di Kabupaten Siak.
 - (3) Terbatasnya pengetahuan masyarakat tentang perlindungan hak-hak konsumen.
- b) Arah Kebijakan
 - (1) Penguatan struktur industri kecil dan menengah dengan menciptakan keterkaitan yang mendukung antar sektor dan strata usaha dalam memperluas lapangan kerja dan kesempatan berusaha.
 - (2) Peningkatan kelancaran arus distribusi barang dan jasa dari pusat produksi ke masyarakat.
 - (3) Peningkatan akses jalur pemasaran dan distribusi barang & jasa.
- d) Program dan Kegiatan Pembangunan
 - e) Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah, dengan kegiatan:
 - (1) Pembinaan dan pemberdayaan industri kecil dan industri rumah tangga terutama pengolahan hasil pertanian.
 - (2) Pemberian kredit industri kecil dan industri rumah tangga.
 - f) Program penataan struktur industri, dengan kegiatan :
 - (1) Pengembangan Kawasan Industri Buton.
 - g) Program Pengembangan Usaha dan Lembaga Perdagangan, dengan kegiatan :
 - (1) Pembinaan dan pengembangan usaha perdagangan.
 - (2) Pembinaan pedagang kecil.
 - (3) Penertiban dan peningkatan pengelolaan pasar.
 - h) Program Persaingan Usaha dan Perlindungan Konsumen, dengan kegiatan :
 - (1) Peningkatan perlindungan konsumen.
 - i) Program Pengendalian Distribusi Barang dan Jasa, dengan kegiatan:
 - (a) Pengendalian distribusi barang dan jasa.

1.2. Bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

- a) Isu Strategis
 - (1) Lemahnya kelembagaan koperasi dan UKM dalam mengembangkan usaha.
 - (2) Terbatasnya permodalan koperasi dan UKM.
 - (3) Rendahnya kualitas SDM dalam mengelola usaha.
 - (4) Lemahnya kemitraan antara pengusaha kecil dan menengah dengan pengusaha besar.
- b) Arah Kebijakan
 - Pembinaan dan pengembangan koperasi dan UKM.
- c) Program dan Kegiatan Pembangunan
 - (1) Pengembangan Kewirausahaan dan Daya Saing PKMK, dengan kegiatan :
 - (a) Pemberdayaan koperasi dan UKM.
 - (b) Penguatan modal koperasi dan UKM.
 - (c) Pembentukan Lembaga Pengembangan Bisnis Ekonomi Kerakyatan.

1.3. Pertanian

- a) Isu Strategis
 - (1) Belum optimalnya pemanfaatan lahan.
 - (2) Rendahnya kualitas sumber daya manusia bidang pertanian.
 - (3) Kurangnya penerapan teknologi produksi dalam bidang pertanian.
 - (4) Kurangnya sarana dan prasarana penunjang pengembangan usaha pertanian.
 - (5) Belum berkembang dan masih lemahnya agrobisnis dan agroindustri.
- b) Arah Kebijakan
 - (1) Peningkatan produksi pertanian dalam arti luas, yang memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif serta berorientasi pada pasar dan memberikan nilai tambah untuk mendukung agroindustri.
- c) Program dan Kegiatan Pembangunan
 - (2) Program Peningkatan Ketahanan Pangan, dengan kegiatan :
 - (a) Pembinaan dan pengembangan usaha peternakan dan perikanan rakyat.
 - (b) Peningkatan produksi tanaman pangan dan hortikultura.
 - (c) Penyediaan sarana produksi pertanian yang dapat terjangkau daya beli petani.
 - (d) Kajian dan penerapan pengembangan pertanian terpadu dengan sistem LEISA (low external input and sustainable agriculture).
 - (e) Peningkatan penyuluhan pertanian.
 - (f) Pembinaan dan pengembangan pertanian terpadu di desa miskin.
 - (g) Pembinaan dan pengembangan perkebunan rakyat.
 - (h) Pembinaan peningkatan dan pengembangan usaha ternak besar.
 - (i) Pengembangan pemberdayaan ekonomi kerakyatan ternak kecil dan ternak unggas.
 - (3) Program Pengembangan Agribisnis, dengan kegiatan :
 - (a) Pengembangan agribisnis tanaman pangan dan hortikultura.
 - (b) Pengembangan agribisnis tanaman perkebunan.
 - (c) Pengembangan agribisnis peternakan.
 - (d) Pengembangan agribisnis perikanan.

1.4. Kehutanan

- a) Isu Strategis
 - (1) Tingginya kerusakan hutan.
 - (2) Terbatasnya hutan rakyat.
 - (3) Maraknya kegiatan penebangan liar dan illegal logging.
 - (4) Belum tersedianya data base kehutanan.
-

- b) Arah Kebijakan
 - (1) Mengembalikan fungsi hutan secara optimal.
 - (2) Perlindungan kawasan hutan.
- c) Program dan Kegiatan Pembangunan
 - (1) Program Pembangunan dan Pembinaan Kehutanan, dengan kegiatan :
 - (a) Penataan dan pengamanan kawasan hutan.
 - (b) Pemetaan potensi hutan di Kabupaten Siak.
 - (c) Pembangunan hutan kota.
 - (d) Pemberantasan illegal logging.
 - (2) Program Pembangunan Usaha Perhutanan Rakyat, dengan kegiatan:
 - (a) Reboisasi dan rehabilitasi hutan dan lahan kritis.
 - (b) Pengembangan dan pemberdayaan hutan rakyat (agro-forestry).
 - (c) Pengembangan kawasan hutan penyangga/buffer area.
 - (d) Revitalisasi hutan mangrove melalui pemberdayaan masyarakat.

2. BIDANG KEWENANGAN LAIN

2.1. Bidang Keuangan dan Usaha Daerah

- a) Isu Strategis
 - (1) Belum optimalnya upaya pengelolaan sumberdaya keuangan dan usaha daerah.
 - (2) Belum optimalnya pengelolaan aset daerah.
 - (3) Belum optimalnya penggalian potensi penerimaan daerah.
- b) Arah Kebijakan
 - (1) Penggalian potensi penerimaan asli daerah yang berkesinambungan guna mendukung kelancaran pembangunan.
 - (2) Mendorong terciptanya iklim investasi yang kondusif di Kabupaten Siak.
- c) Program dan Kegiatan Pembangunan
 - (3) Program Peningkatan penerimaan daerah, dengan kegiatan :
 - (a) Peningkatan penerimaan keuangan daerah.
 - (b) Inventarisasi potensi PAD.
 - (4) Program Pembinaan dan Pengembangan Usaha Daerah, dengan kegiatan:
 - (a) Pengembangan promosi investasi.
 - (b) Pengembangan Usaha Daerah dan Penyertaan Modal Daerah.

2.2. BIDANG PEMBANGUNAN DAERAH

- a) Isu Strategis
 - (1) Masih lemahnya kemampuan sumber daya manusia dalam mengelola pembangunan daerah secara komprehensif.
 - (2) Masih minimnya jangkauan pembangunan daerah dan pelayanan pemerintahan desa/kelurahan kepada masyarakat
 - (3) Belum optimal keterlibatan aktif masyarakat dalam pembangunan daerah.
 - (4) Belum optimalnya pemanfaatan potensi wilayah.
 - (5) Belum optimalnya perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah.
 - b) Arah Kebijakan
 - (1) Pengembangan dan pemberdayaan masyarakat.
 - c) Program dan Kegiatan Pembangunan
 - (2) Program Pemberdayaan Masyarakat, Dengan Kegiatan :
 - (A) Pembinaan Dan Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan.
 - (B) Peningkatan Pemberdayaan Kecamatan, Desa Dan Kelurahan.
-

D. KEBIJAKAN, PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PELAKSANAAN MISI KE EMPAT

Untuk Melaksanakan Misi Ke-Empat “Mengembangkan Dan Meningkatkan Infrastruktur Daerah Yang Mendukung Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat Dan Pembangunan Daerah Yang Berkelanjutan” Dalam Lima Tahun Ke Depan, Ditetapkan Arah Kebijakan, Program Dan Kegiatan Prioritas Lima Tahunan Sesuai Dengan Kewenangan Yang Dimiliki Oleh Daerah Yaitu :

1. BIDANG KEWENANGAN WAJIB

1.1. Bidang Pekerjaan Umum-Sumber Daya Air

- a) Isu Strategis
 - (1) Sumber daya air belum dimanfaatkan secara maksimal.
 - (2) Belum terpenuhinya ketersediaan air bagi pertanian.
 - (3) Belum terpenuhinya ketersediaan air baku bagi pemenuhan kebutuhan air bersih.
 - (4) Belum terpeliharanya daerah sempadan, tebing sungai, dan alur sungai.
- b) Arah Kebijakan
 - (1) Penataan dan pengamanan sempadan sungai, tebing sungai, dan alur sungai dalam rangka pengembangan waterfront area.
 - (2) Optimalisasi pemanfaatan daerah rawa dan pengembangan jaringan pengairan.
 - (3) Menjamin ketersediaan air baku bagi kebutuhan air bersih masyarakat.
- c) Program dan Kegiatan Pembangunan
 - (4) Program Pengendalian Banjir dan Konservasi Sumber-sumber Air, dengan kegiatan :
 - (a) Perbaikan dan pengamanan sungai.
 - (b) Perbaikan dan normalisasi sungai.
 - (5) Program Pengembangan Jaringan Irigasi dan Reklamasi Rawa, dengan kegiatan:
 - (a) Pengembangan dan pembangunan daerah pengairan.
 - (b) Operasi dan pemeliharaan jaringan pengairan.
 - (6) Program Pengusahaan Sumber-sumber Air dan Penyediaan Air Baku, dengan kegiatan :
 - (a) Penyediaan dan pengelolaan air baku.

1.2. Bidang Pekerjaan Umum-Perhubungan

- a) Isu Strategis
 - (1) Belum tersedianya jaringan jalan yang memadai, baik secara kuantitas maupun kualitas.
 - (2) Belum adanya standar angkutan umum yang layak.
 - (3) Belum tersedianya sarana dan prasarana perhubungan laut yang memenuhi standar sesuai tatanan kepelabuhan nasional pada kawasan yang strategis.
 - b) Arah Kebijakan
 - (1) Pembangunan, peningkatan serta pemeliharaan sarana dan prasarana perhubungan untuk memperlancar mobilitas orang dan barang.
 - (2) Peningkatan dan pembangunan prasarana jalan, terutama untuk membuka isolasi daerah yang terisolir dan miskin, pengembangan ekonomi wilayah, serta pengembangan wilayah strategis.
 - c) Program dan Kegiatan Pembangunan
 - (1) Program Rehabilitasi Transportasi Jalan, dengan kegiatan :
 - (a) Pemeliharaan jalan dan jembatan.
-

- (3) Program Peningkatan/Pembangunan Transportasi Jalan, dengan kegiatan :
 - (a) Pembangunan jalan dan jembatan.
 - (b) Peningkatan jalan dan jembatan.
 - (c) Pembangunan dan penggantian jembatan.
 - (d) Perencanaan dan pengawasan teknis jalan dan jembatan (P3T-JJ).
- (4) Program Pengembangan Aksesibilitas Prasarana Jalan, dengan kegiatan:
 - (a) Peningkatan dan pengadaan fasilitas peralatan Pekerjaan Umum.
- (5) Program Pengembangan Lalu Lintas Angkutan Jalan, dengan kegiatan:
 - (a) Pengembangan sarana dan prasarana keselamatan lalu lintas angkutan jalan.
 - (b) Pembinaan dan pengawasan lalu lintas jalan.
 - (c) Peningkatan fasilitas pengujian kendaraan bermotor.
- (6) Program Peningkatan dan Pembangunan Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan, dengan kegiatan :
 - (a) Peningkatan fasilitas angkutan sungai.
- (7) Program Pengembangan Aksesibilitas Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan, dengan kegiatan :
 - (a) Pembangunan fasilitas kepelabuhan.

1.3. Bidang Pekerjaan Umum-Perumahan dan Pemukiman

- a) Isu Strategis
 - (1) Belum tertatanya dengan baik wilayah pemukiman dan perkantoran.
 - (2) Masih minimnya sarana perumahan dan permukiman, serta penyehatan lingkungan permukiman.
- b) Arah Kebijakan

Perbaiki perumahan dan pemukiman, serta penyehatan lingkungan permukiman yang layak bagi masyarakat.
- c) Program dan Kegiatan Pembangunan
 - (1) Program Pengembangan Perumahan, dengan kegiatan :
 - (a) Penyediaan perumahan bagi masyarakat
 - (2) Program Pengembangan Prasarana dan Sarana Permukiman, dengan kegiatan :
 - (a) Perbaiki perumahan dan pemukiman (P2P) Pedesaan.
 - (b) Penyehatan lingkungan permukiman (PLP) Pedesaan.
 - (c) Penyediaan dan pengelolaan sarana air bersih (PPAB) Pedesaan.
 - (3) Program Pengembangan dan Pengelolaan Perkotaan, dengan kegiatan:
 - (a) Perbaiki perumahan dan permukiman (P2P) Perkotaan.
 - (b) Penyehatan lingkungan permukiman (PLP) perkotaan.
 - (c) Penyediaan dan pengelolaan air bersih perkotaan.
 - (d) Pengembangan sarana perkotaan.
 - (e) Pengelolaan kebersihan dan taman kota.

1.4. Bidang Lingkungan Hidup dan Tata Ruang

- a) Isu Strategis
 - (1) Rusaknya ekosistem akibat dari pembangunan yang tidak berorientasi kepada ramah lingkungan.
 - (2) Kurangnya pengawasan dan pengendalian di bidang lingkungan yang dapat menimbulkan kerusakan ekosistem.
 - (3) Kurangnya kesadaran masyarakat industri besar dan aparat pemerintah terhadap pelestarian lingkungan, penataan ruang dan bangunan.
 - (4) Tingginya tingkat pencemaran Sungai Siak.
 - (5) Kurangnya pengawasan dan pengendalian terhadap penataan bangunan dan penataan ruang.
 - b) Arah Kebijakan
 - (1) Pemanfaatan SDA secara bertanggung jawab guna mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan.
 - (2) Pencegahan pencemaran industri.
-

(3) Penataan ruang untuk menjamin pemanfaatan ruang yang terkendali, serta tertib sistem pertanahan yang meliputi tertib penguasaan, penggunaan, pemilikan dan pengalihan hak atas tanah.

c) Program dan Kegiatan Pembangunan

(4) Program Peningkatan Efektivitas Pengelolaan, Konservasi, dan Rehabilitasi SDA, dengan kegiatan :

(a) Pengelolaan lingkungan hidup.

(5) Program Penataan Kelembagaan dan Penegakan Hukum dalam Pelestarian Lingkungan Hidup, dengan kegiatan :

(a) Penyusunan Perda tentang lingkungan hidup.

(6) Program Pencegahan Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan Hidup, dengan kegiatan :

(a) Pengendalian dampak pencemaran lingkungan hidup.

(7) Program Penataan Ruang, dengan kegiatan :

(a) Rencana Umum Tata Ruang di Kabupaten Siak.

(8) Program Pengelolaan Pertanahan, dengan kegiatan :

(a) Peningkatan pengelolaan pertanahan.

1.5. Bidang Pariwisata dan Telekomunikasi

a) Isu Strategis

(1) Kurangnya sarana dan prasarana pendukung pariwisata.

(2) Kurangnya promosi dan pemasaran di bidang kepariwisataan.

(3) Belum tergalinya obyek-obyek wisata asli daerah.

(4) Kurang kemampuan SDM bidang teknis pariwisata.

(5) Kurangnya sarana dan prasarana telekomunikasi.

b) Arah Kebijakan

(1) Optimalisasi potensi wisata unggulan daerah.

(2) Pengembangan sarana dan prasarana pariwisata.

(3) Pengembangan sarana dan prasarana telekomunikasi

c) Program dan Kegiatan Pembangunan

(4) Program Pemasaran Pariwisata, dengan kegiatan :

(a) Peningkatan promosi pariwisata daerah.

(5) Program Pengembangan Produk Pariwisata, dengan kegiatan:

(a) Pengembangan obyek wisata

(b) Perencanaan dan penataan obyek wisata.

(c) Pengembangan sarana dan prasarana obyek wisata.

(6) Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Telekomunikasi, dengan kegiatan :

(a) Pengembangan sarana dan prasarana telekomunikasi.

1.5. Bidang Pertambangan dan Energi

a) Isu Strategis

(1) Terbatas dan belum meratanya penyediaan energi listrik.

(2) Belum terolahnya sumber tenaga listrik alternatif selain tenaga diesel.

(3) Belum terdatanya potensi pertambangan dan energi.

b) Arah Kebijakan

Pemanfaatan sumber daya pertambangan dan energi secara efisien untuk menjamin pembangunan yang berkelanjutan.

c) Program dan Kegiatan Pembangunan

(1) Program Pengembangan Tenaga Listrik, dengan kegiatan :

(a) Pembangunan elektrifikasi.

(2) Program Pengembangan Listrik Pedesaan, dengan kegiatan :

(a) Pengembangan dan peningkatan pelayanan listrik pedesaan.

BAB VII

PENGUKURAN DAN EVALUASI KINERJA

Pengukuran kinerja digunakan untuk melakukan penilaian atas keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan, program, dan kebijakan pembangunan dalam rangka mewujudkan misi dan visi Pemerintah Kabupaten Siak.

Selanjutnya dilakukan evaluasi kinerja dengan cara menghitung nilai capaian kinerja dari pelaksanaan kegiatan, program, dan kebijakan pembangunan yang telah ditetapkan. Kemudian untuk menilai pertanggung-jawaban pelaksanaan APBD oleh Bupati Siak kepada DPRD Kabupaten Siak berdasarkan tolok ukur perencanaan strategik sesuai dengan amanah Peraturan Pemerintah Nomor 108 tahun 2000 tentang Pertanggungjawaban Kepala Daerah, dilakukan pula analisis pencapaian kinerja Bupati Siak dengan menginterpretasikan lebih lanjut hasil pengukuran kinerja yang menggambarkan keberhasilan dan kegagalan Pemerintah Kabupaten Siak dalam melaksanakan setiap kegiatan, program, kebijakan pembangunan yang merupakan bidang kewenangan wajib dengan skala prioritas yang tajam dan sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Kabupaten Siak.

A. KERANGKA PENGUKURAN KINERJA

Dalam kerangka pengukuran kinerja dijelaskan penetapan indikator kinerja, penetapan capaian kinerja dan formulir pengukuran kinerja yang digunakan untuk mengidentifikasi indikator kinerja dan nilai capaiannya sebagai dasar penilaian capaian kinerja kegiatan, program, dan kebijakan.

1. Penetapan Indikator Kinerja

Penetapan indikator kinerja merupakan proses identifikasi dan klasifikasi indikator kinerja Bupati Siak melalui sistem pengumpulan dan pengolahan data dan informasi untuk menentukan kinerja kegiatan, program, dan kebijakan. Indikator ini perlu disepakati bersama antara Bupati Siak dengan DPRD Kabupaten Siak, karena indikator pengukuran kinerja akan digunakan oleh DPRD Kabupaten Siak dalam menilai kinerja tahunan dan akhir masa jabatan Bupati Siak. Indikator kinerja dimaksud dikenakan terhadap setiap kegiatan dan terdiri dari lima tolok ukur, yakni :

- a. Masukan (inputs)
- b. Keluaran (out-puts)
- c. Hasil (out-comes)
- d. Manfaat (benefit)
- e. Dampak (impacts)

Indikator inputs adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran. Indikator ini dapat dana, sumber daya manusia, lapangan kerja, informasi, kebijakan/peraturan, pelayanan umum, perundang-undangan dan sebagainya.

Indikator out-puts adalah segala sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik maupun non fisik.

Indikator out-comes adalah indikator yang menggambarkan hasil nyata dari keluaran suatu kegiatan.

Indikator benefits adalah sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan. Indikator kinerja ini menggambarkan manfaat yang diperoleh dari indikator hasil. Manfaat tersebut baru terlihat atau diketahui setelah beberapa waktu kemudian khususnya dalam jangka menengah dan jangka panjang.

Indikator impacts memperlihatkan pengaruh yang ditimbulkan dari manfaat yang diperoleh dari hasil kegiatan. Seperti halnya indikator manfaat, indikator dampak juga pada umumnya baru dapat diketahui dalam jangka waktu menengah atau jangka panjang. Indikator impacts ini menunjukkan dasar pemikiran dilaksanakannya kegiatan yang menggambarkan aspek makro pelaksanaan kegiatan, tujuan kegiatan secara sektoral, regional dan nasional.

2. Penetapan Capaian Kinerja

Untuk mengetahui dan menilai capaian indikator kinerja pelaksanaan kegiatan, program dan kebijaksanaan yang telah ditetapkan dalam Renstra.

Ada beberapa rumus yang digunakan dalam penghitungan capaian indikator kinerja, yaitu :

- a. Apabila diasumsikan bahwa semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian indikator kinerja yang semakin baik, maka untuk penghitungan capaian indicator kinerja digunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi} \times 100\%}{\text{Rencana}}$$

- b. Apabila diasumsikan bahwa semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya pencapaian kinerja, maka digunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{[\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})] \times 100\%}{\text{Rencana}}$$

- c. Nilai Capaian Indikator Kinerja :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Capaian Indikator Kinerja} \times \text{Bobot Indikator Kinerja}}{100\%}$$

Pembobotan terhadap indikator kinerja berorientasi terhadap hasil/outcomes sebagai manfaat langsung dari out-puts yang dihasilkan selayaknya diberi bobot terbesar dari keseluruhan bobot. Di sini harus diciptakan kesepakatan pembobotan, dimana dalam dokumen ini kerangka pembobotannya adalah sebagai berikut :

Elemen Yang Dibobot	Individual	Tertimbang
• Input	100%	25%
• Output	100%	40%
• Outcomes	100%	25%
• Benefits	100%	10%
• Impacts	100%	*)
Total	100%	100%

Keterangan : *) Tidak diberi bobot, namun apabila ada program-program yang sudah mencapai indikator ini dapat diberi bintang sebagai puncak keberhasilan program. Jumlah bintang dapat dipertimbangkan dalam penerimaan LPJ Pemerintah.

Pembobotan secara tertimbang di atas, karena masih adanya keterbatasan dalam menetapkan benefit dan impact. Pertimbangan selanjutnya adalah apabila setiap kegiatan hanya dapat ditetapkan sampai dengan indikator out-puts saja menyebabkan capaian kinerja tidak akan lebih dari 60% saja. Hal ini untuk menunjukkan bahwa pengukuran kinerja lebih ditekankan kepada orientasi hasil (outcomes) sesuai azas akuntabilitas yang menyatakan bahwa setiap kegiatan atau hasil akhir dari kegiatan harus dapat dipertanggung-jawabkan kepada masyarakat baik keberhasilan maupun kegagalan.

Untuk memudahkan penentuan bobot perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Indikator yang menunjukkan outcomes atau benefits diberi bobot yang lebih tinggi daripada indikator yang menunjukkan inputs atau out-puts;
- b. Indikator yang lebih erat kaitannya dengan kebijaksanaan, program, atau kegiatan diberi bobot yang lebih tinggi ;
- c. Indikator yang mempunyai keterkaitan dengan kebijaksanaan nasional, diberi bobot yang tinggi ;
- d. Indikator yang berhubungan dengan hal-hal yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Siak dan dapat dikendalikan, diberi bobot yang lebih tinggi dari pada indikator yang menggambarkan hasil kegiatan yang di luar kendali.

3. Formulir Pengukuran Kinerja

Untuk memudahkan pengukuran kinerja, digunakan Formulir Pengukuran Kinerja (PK) sebagai berikut :

PENGUKURAN KINERJA

Tahun :

Formulir PK

Kebijaksanaan	Program	Kegiatan	Penetapan Indikator Kinerja		Penetapan Capaian Indikator Kinerja						
			Indikator Kinerja	Satuan	Rencana	Realisasi	Capaian Indikator Kinerja (%)	Bobot Indikator Kinerja (%)	Hasil Capaian Indikator Kinerja (%)	Ket	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
			Inputs								
				Jumlah nilai capaian kelompok indikator kinerja inputs							
			Out-puts								
				Jumlah nilai capaian kelompok indikator kinerja out-puts							
			Out comes								
				Jumlah nilai capaian kelompok indikator kinerja outcomes							
			Benefits								
				Jumlah nilai capaian kelompok indikator kinerja benefits							
			Impacts								
				Jumlah nilai capaian kelompok indikator impacts							

B. EVALUASI KINERJA

1. Evaluasi kinerja diartikan sebagai proses umpan balik atas kinerja kegiatan, program dan kebijaksanaan guna mendorong peningkatan kinerja di masa mendatang.
2. Evaluasi kinerja kegiatan menunjukkan capaian kinerja atas keberhasilan dan kegagalan suatu kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan masyarakat.
3. Evaluasi kinerja terhadap kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Siak dalam menjalankan amanat Renstra, harus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :
 - Evaluasi Kinerja dilakukan hanya dilaksanakan pada kegiatan yang telah menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Siak dan berdasarkan pada Perda-Perda yang sudah disahkan oleh DPRD.
 - Disamping itu penilaian evaluasi kinerja juga berdasarkan pada kemampuan dana APBD dan waktu yang tersedia.
4. Untuk membantu pelaksanaan evaluasi kinerja, digunakan formulir evaluasi kinerja yang terdiri dari Formulir EK-1 yaitu untuk penilaian kinerja kegiatan, Formulir EK-2 untuk penilaian kinerja program dan Formulir EK-3 untuk penilaian kinerja kebijaksanaan.
5. Bentuk Formulir evaluasi kinerja dimaksud adalah sebagai berikut :
 - a. Formulir Evaluasi Kinerja Kegiatan (Formulir EK-1)

EVALUASI KINERJA KEGIATAN

Tahun : _____ Formulir EK-1

No	Program	Kegiatan	Kelompok Indikator Kinerja	Capaian Kelompok Indikator Kinerja (%)	Bobot Kelompok Indikator Kinerja (%)	Nilai Capaian Kelompok Indikator Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7			
			Inputs						
			Outputs						
			Outcomes						
			Benefits						
			Impacts						
			Jumlah nilai capaian kegiatan 1						
			Inputs						
			Outputs						
			Outcomes						
			Benefits						
			Impacts						
			Jumlah nilai capaian kegiatan 2						

Untuk memperoleh nilai capaian kelompok indikator kinerja digunakan rumus :

$$\text{Capaian Kelompok Indikator Kinerja} = \frac{\text{Capaian Kelompok Indikator Kinerja} \times \text{Bobot Kelompok Indikator Kinerja}}{100\%}$$

Selanjutnya, **Nilai Capaian Kegiatan** diperoleh dengan cara menjumlahkan nilai capaian kelompok indikator kinerja.

b. Formulir Evaluasi Kinerja Program (Formulir EK-2)

EVALUASI KINERJA PROGRAM

Tahun :

Formulir EK-2

No	Kebijaksanaan	Program	Kegiatan	Nilai Capaian Kegiatan (%)	Bobot Kegiatan (%)	Nilai Capaian Akhir Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7
			Jumlah nilai capaian kegiatan 1			
			Jumlah nilai capaian kegiatan 2			

Rumus yang digunakan untuk memperoleh nilai capaian akhir kegiatan yaitu :

$$\text{Nilai Capaian Akhir Kegiatan} = \text{Nilai} \frac{\text{Capaian Kegiatan} \times \text{Bobot Kegiatan}}{100\%}$$

Selanjutnya, **Nilai Capaian Program** diperoleh dengan cara menjumlahkan nilai capaian akhir kegiatan.

c. Formulir Evaluasi Kinerja Kebijakan (Formulir EK-3)

EVALUASI KINERJA KEBIJAKAN

Tahun :

Formulir EK-3

No	Kebijakan	Program	Nilai Capaian Program	Bobot Program	Nilai Capaian Akhir Program
1	2	3	4	5	6
			Jumlah Capaian Untuk kebijakan		

Untuk memperoleh nilai capaian akhir program digunakan rumus :

$$\text{Nilai Capaian Akhir Program} = \text{Nilai} \frac{\text{Capaian Program} \times \text{Bobot Program}}{100\%}$$

Selanjutnya, **Nilai Capaian Kebijakan** diperoleh dengan cara menjumlahkan nilai capaian akhir program.

C. KESIMPULAN HASIL EVALUASI KINERJA

Untuk membuat kesimpulan hasil evaluasi digunakan skala pengukuran kinerja. Skala pengukuran kinerja dimaksud dibuat berdasarkan pertimbangan dan kesepakatan Pemerintah Kabupaten Siak dan DPRD Kabupaten Siak, antara lain dengan skala pengukuran ordinal, sebagai berikut :

85 - 100	= Baik	Sangat Baik	Sangat Berhasil
70 - < 85	= Sedang	Baik	Berhasil
55 - < 70	= Kurang	Sedang	Cukup Berhasil
X < 55	= Sangat Kurang	Kurang Baik	Tidak Berhasil

D. ANALISIS PENCAPAIAN AKUNTABILITAS KINERJA

- Suatu Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Tidak Hanya Berisi Tingkat Keberhasilan/Kegagalan Yang Dicerminkan Oleh Evaluasi Indikator-Indikator Kinerja Sebagaimana Yang Ditunjukkan Oleh Pengukuran Dan Penilaian Kerja. Tetapi Juga Harus Menyajikan Data Dan Informasi Relevan Lainnya Bagi Pembuat Keputusan Agar Dapat Menginterpretasikan Keberhasilan Atau Kegagalan Tersebut Secara Lebih Luas Dan Mendalam.
- Oleh Karena Itu, Dari Kesimpulan Hasil Evaluasi Perlu Dibuat Suatu Analisis Tentang Pencapaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Secara Keseluruhan. Analisis Tersebut Meliputi Uraian Tentang Keterkaitan Pencapaian Kinerja Kegiatan Dan Program Dengan Kebijakan Dalam Rangka Mewujudkan Misi Dan Visi Sebagaimana Ditetapkan Dalam Perencanaan Strategik. Dalam Analisis Ini Perlu Pula Dijelaskan Proses Dan Nuansa Pencapaian Misi Dan Visi Secara Efisien, Efektif Dan Ekonomis Sesuai Dengan Kebijakan, Program, Dan Kegiatan Yang Telah Ditetapkan. Analisis Tersebut Dilakukan Dengan Menggunakan Informasi Atau Data Yang Diperoleh Secara Lengkap Dan Rinci. Disamping Itu, Perlu Pula Dilakukan Analisis Terhadap Komponen-Komponen Penting Dalam Evaluasi Kinerja Yang Antara Lain Mencakup Analisis *Inputs-Outputs*, Analisis Realisasi *Outcomes* Dan *Benefits*, Analisis *Impacts* Baik Positif Maupun Negatif, Dan Analisis Proses Pencapaian Indikator-Indikator Kinerja Tersebut; Analisis Keuangan, Dan Analisis Kebijakan.
- Analisis Tersebut Antara Lain Dilakukan Dengan Cara Membandingkan Antara Indikator Kinerja Dengan Realisasi, Seperti:
 1. Perbandingan antara kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan;
 2. Perbandingan antara kinerja nyata dengan tahun-tahun sebelumnya;
 3. Perbandingan kinerja suatu instansi dengan instansi lain yang unggul dibidangnya atau dengan sektor swasta;
 4. Perbandingan kinerja nyata dengan kinerja di negara-negara lain atau dengan standar internasional.
- ***Bagi Instansi Pemerintah yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat, perlu pula ditetapkan standar yang berkaitan dengan penggunaan jasa pelayanan pemerintah, dengan memperhatikan standar internasional dan kendala-kendala atau tingkat kepuasan yang diinginkan masyarakat pelanggan.***
- Selanjutnya untuk melihat tingkat keberhasilan kinerja suatu instansi, terutama yang sifatnya lintas sektoral, digunakan pula indikator-indikator ekonomi, sosial, atau indikator lainnya yang bersifat nasional maupun internasional, seperti *Human Development Index* (HDI), PDRB, PDRB per kapita, tingkat inflasi, ekspor, impor, tingkat kualitas dan pemerataan pelayanan kesehatan, tingkat kematian bayi dan balita, tingkat kesehatan ibu dan anak, tingkat kesehatan gizi masyarakat dan tingkat usia harapan hidup rata-rata penduduk dan sebagainya.

BAB VIII

MATRIK INDIKASI PROGRAM DAN KEGIATAN DAERAH

Pada bab ini menjabarkan program dan kegiatan prioritas daerah yang disesuaikan menurut misi yang akan dicapai berdasarkan bidang kewenangan wajib disusul dengan bidang kewenangan lainnya sebagaimana sistematika penyusunan. Adapun program dan kegiatan tersebut meliputi :

A. Program dan kegiatan prioritas daerah dalam rangka pelaksanaan misi pertama **“Mengembangkan dan meningkatkan Sumber Daya Manusia profesional yang dilandasi keimanan dan ketaqwaan, serta penguasaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dalam lingkungan nilai-nilai Budaya Melayu”** meliputi :

1. Bidang Kewenangan Wajib
2. Bidang Kewenangan Lain

B. Program dan kegiatan prioritas daerah dalam rangka pelaksanaan misi kedua **“Meningkatkan kemampuan dan kapasitas Pemerintah Daerah demi terwujudnya pemerintahan yang baik (*Good Governance*)”** meliputi :

1. Bidang Kewenangan Wajib
2. Bidang Kewenangan Lain

C. Program dan kegiatan prioritas daerah dalam rangka pelaksanaan misi ketiga **“Memberdayakan masyarakat dan seluruh kekuatan ekonomi daerah dengan memperkuat struktur perekonomian berbasis kerakyatan yang bertumpu pada agribisnis dan agroindustri”** meliputi :

1. Bidang Kewenangan Wajib
2. Bidang Kewenangan Lain

D. Program dan kegiatan prioritas daerah dalam rangka pelaksanaan misi keempat **“Mengembangkan dan meningkatkan infrastruktur daerah yang mendukung peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan daerah yang berkelanjutan”** meliputi :

1. Bidang Kewenangan Wajib
 2. Bidang Kewenangan Lain
-

Matriks Daftar Indikasi Program dan Daerah

MISI I : Mengembangkan dan meningkatkan Sumber Daya Manusia profesional yang dilandasi keimanan dan ketaqwaan, serta penguasaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dalam lingkungan nilai-nilai Budaya Melayu

ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	KEGIATAN	KET
5	6	7	8
A. BIDANG KEWENANGAN WAJIB			
I. BIDANG PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA			
1	Perluasan dan pemerataan kesempatan mengenyam pendidikan yang berkualitas bagi seluruh masyarakat	1.1.3 Pembangunan dan revitalisasi SD/MI 1.1.2 Perbaikan/rehabilitasi sarana dan prasarana sekolah dasar/MI 1.1.3 Peningkatan mutu pendidikan dasar dan prasekolah 1.2.1 Peningkatan pembangunan pendidikan dan rehabilitasi sekolah menengah 1.2.2 Perbaikan / rehabilitasi sarana dan prasarana sekolah menengah /MTs 1.2.3 Peningkatan mutu pendidikan menengah 1.3.1 Perbaikan kurikulum lokal (kurikulum terpadu) pendidikan dasar dan menengah sehingga memenuhi kebutuhan SDM pembangunan daerah 1.3.2 Pemberian beasiswa bagi pelajar berprestasi dan kurang mampu	
	1.1	Pendidikan Dasar dan Prasekolah	
	1.2	Pendidikan Menengah	
	1.3	Sinkronisasi dan Koordinasi Pembangunan Pendidikan Nasional	

MATRIKS DAFTAR INDIKASI PROGRAM DAN DAERAH

MISI I : Mengembangkan dan meningkatkan Sumber Daya Manusia profesional yang dilandasi keimanan dan ketaqwaan, serta penguasaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dalam lingkungan nilai-nilai Budaya Melayu

ARAH KEBIJAKAN		PROGRAM		KEGIATAN		KET
5		6		7		8
2	Menggali potensi budaya asli daerah guna menangkal ekkses negatif penetrasi budaya asing	1.4	Pendidikan Luar Sekolah	1.4.1	Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan luar sekolah.	
				1.4.2	Peningkatan mutu pendidikan luar sekolah	
3	Pembinaan kepemudaan dan olahraga berprestasi	2.1	Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan	2.1.1	Studi penulisan sejarah dan kebudayaan Kerajaan Siak Sri Indrapura	
				2.1.2	Studi Rencana Induk Pengembangan Obyek Wisata (RIPOW) Istana Siak dan Obyek Wisata Sungai Mempura	
				2.1.3	Pembinaan sanggar kesenian daerah	
3	Pembinaan kepemudaan dan olahraga berprestasi	3.1	Pemasyarakatan Olah Raga dan Kesegaran Jasmani	3.1.1	Pembangunan sarana dan prasarana olahraga	
				3.1.2	Pembinaan olahraga	
I I	BIDANG KESEHATAN					
1	Memelihara dan meningkatkan pelayanan kesehatan yang prima, merata dan terjangkau	1.1	Upaya Kesehatan	1.1.1	Pencegahan dan pemberantasan penyakit	
				1.1.2	Peningkatan kesehatan lingkungan	
				1.1.3	Peningkatan mutu pelayanan kesehatan	
				1.1.4	Peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat	
				1.2.1	Peningkatan gizi masyarakat	
1.2	Perbaikan Gizi Masyarakat	1.2.1	Peningkatan gizi masyarakat			

MATRIKS DAFTAR INDIKASI PROGRAM DAN DAERAH

MISI I : Mengembangkan dan meningkatkan Sumber Daya Manusia profesional yang dilandasi keimanan dan ketaqwaan, serta penguasaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dalam lingkungan nilai-nilai Budaya Melayu

ARAH KEBIJAKAN		PROGRAM		KEGIATAN		KET
5		6		7		8
		1. 3	Sumber Daya Kesehatan	1.3. 1	Peningkatan dan penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan masyarakat	
		1. 4	Kebijakan Manajemen dan Pembangunan Kesehatan	1.4. 1	Pembangunan Rumah Sakit dan prasarana pelayanan kesehatan lainnya	
				1.4. 2	Peningkatan fasilitas sarana pelayanan kesehatan masyarakat	
				1.4. 3	Peningkatan kualitas tenaga medis dan paramedis	
III	BIDANG TENAGA KERJA					
1	Peningkatan daya saing dan kemandirian tenaga kerja, perlindungan dan keberpihakan tenaga kerja	1. 1	Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	1.1. 1	Peningkatan daya saing dan kemandirian tenaga kerja, perlindungan dan keberpihakan tenaga kerja	
		1. 2	Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	1.2. 1	Perlindungan hak dan kewajiban pekerja	
B. BIDANG KEWENANGAN LAIN						
I. BIDANG KEPENDUDUKAN DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL						
1	Pengendalian Penduduk	1. 1	Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Kependudukan	1.1. 1	Pembinaan pelayanan kependudukan dan catatan sipil	
		1. 2	Keluarga Berencana	1.2. 1	Peningkatan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi	

MATRIKS DAFTAR INDIKASI PROGRAM DAN DAERAH

MISI I : Mengembangkan dan meningkatkan Sumber Daya Manusia profesional yang dilandasi keimanan dan ketaqwaan, serta penguasaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dalam lingkungan nilai-nilai Budaya Melayu

ARAH KEBIJAKAN		PROGRAM		KEGIATAN		KET
5		6		7		8
2	Pengendalian masalah sosial kemasyarakatan	2.1	Pengembangan Potensi Kesejahteraan Sosial	2.1.1	Pembangunan sarana kesejahteraan sosial	
		2.2	Pengembangan keserasian kebijakan publik dan penanganan masalah sosial kemasyarakatan	2.2.1	Peningkatan pelayanan penanggulangan dan rehabilitasi penyandang masalah sosial	
I	BIDANG KEAGAMAAN					
I						
1	Menciptakan SDM unggul yang bertaqwa kepada Tuhan YME	1.1	Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama	1.1.1	Peningkatan sarana dan prasarana kehidupan beragama	
		1.2	Peningkatan Pemahaman dan Pengamalan Agama serta Kerukunan Hidup Umat Beragama	1.2.1	Pembinaan dan penyuluhan keagamaan dan kerukunan hidup	
		1.3	Peningkatan Kualitas Pendidikan Agama	1.3.1	Pembinaan pendidikan agama tingkat dasar dan menengah	

Matriks Daftar Indikasi Program dan Daerah

MISI II : Meningkatkan kemampuan dan kapasitas Pemerintah Daerah demi terwujudnya pemerintahan yang baik (*Good Governance*)

	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	KEGIATAN	KET
	5	6	7	8
A	BIDANG KEWENANGAN LAIN			
I.	BIDANG ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI			
1	Peningkatan sistem informasi daerah	1. Peningkatan Kapasitas Dan Pengembangan Kemampuan Sumber Daya IPTEK	1.1.1 Pengembangan sistem informasi manajemen	
2	Peningkatan penguasaan dan pemanfaatan IPTEK dalam semua aspek pembangunan	2. Peningkatan Kemandirian dan Keunggulan IPTEK	2.1.1 Pengembanagn informasi pembangunan daerah 2.1.2 Penelitian dan perencanaan bidang ekonomi 2.1.3 Penelitian dan perencanaan bidang kesejahteraan sosial	
II	BIDANG HUKUM			
1	Peningkatan kesadaran dan penegakan hukum dalam rangka menumbuhkan supremasi hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara	1. Peningkatan kesadaran Hukum dan Pengembangan Budaya Hukum	1.1.1 Sosialisasi dan penyuluhan hukum / perundang-undangan	
III	BIDANG APARATUR DAN PENGAWASAN			
1	Peningkatan sarana dan prasarana serta kualitas aparatur pemerintah daerah yang bersih dan berwibawa	1. Peningkatan kapasitas SDM	1.1.1 Peningkatan Sumber Daya aparatur pemerintah 1.1.2 Pelatihan dan analisa jabatan di lingkungan pemerintah Kab.Siak	
2	Peningkatan kesejahteraan aparatur pemerintah	2. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur pemerintah	2.1.1 Pembangunan kantor pemerintah	

MATRIKS DAFTAR INDIKASI PROGRAM DAN DAERAH

MISI II : Meningkatkan kemampuan dan kapasitas Pemerintah Daerah demi terwujudnya pemerintahan yang baik (*Good Governance*)

ARAH KEBIJAKAN		PROGRAM		KEGIATAN		KET
5		6		7		8
3	Peningkatan Efektifitas & Efisiensi Pembangunan	3.1	Peningkatan pelayanan publik	2.1.2	Peningkatan prasarana fisik pamong praja dan aparaturnya	
				2.1.3	Peningkatan sarana dan prasarana pemerintahan desa dan keluarga	
				2.1.4	Peningkatan sarana mobilitas dan fasilitas kantor pemerintah	
				3.1.1	Perencanaan umum pembangunan Kab Siak	
				3.1.2	Pembinaan dan pengendalian administrasi pembangunan daerah	
				3.1.3	Pembangunan prasarana dan sistem pelayanan satu atap	
				3.2.1	Pengawasan dan pengendalian pembangunan daerah	
				3.3.1	Monitoring dan evaluasi pembangunan daerah	
				3.3	Peningkatan kualitas pelayanan informasi dan pembangunan	
IV	BIDANG POLITIK, INFORMASI DAN KOMUNIKASI					
1	Peningkatan Transparansi pelaksanaan pembangunan	1.1	Peningkatan prasarana penyiaran dan media massa	1.1.1	Peningkatan sarana komunikasi informasi dan dokumentasi pemerintah daerah	
2	Peningkatan suasana kehidupan demokratis guna menunjang kualitas pembangunan	2.1	Pengembangan budaya politik	2.1.1	Pembinaan dan pemberdayaan politik masyarakat	

Matriks Daftar Indikasi Program dan Daerah

MISI III : Memberdayakan masyarakat dan seluruh kekuatan ekonomi daerah dengan memperkuat struktur perekonomian berbasis kerakyatan yang bertumpu pada agrobisnis dan agroindustri

ARAH KEBIJAKAN		PROGRAM		KEGIATAN		KET
5		6		7		8
I. BIDANG KEWENANGAN WAJIB						
I.	BIDANG INDUSTRI DAN PERDAGANGAN					
1	Penguatan struktur industri kecil dan menengah dengan menciptakan keterkaitan yang mendukung antar sektor dan strata usaha dalam memperluas lapangan kerja dan kesempatan berusaha	1. 1	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	1.1.1	Pembinaan dan pemberdayaan industri kecil dan industri rumah tangga	
2	Peningkatan kelancaran arus distribusi barang dan jasa dari pusat produksi ke masyarakat	2. 1	Pengembangan Usaha dan Lembaga Perdagangan	2.1.1	Pembinaan dan pengembangan usaha perdagangan	
				2.1.2	Peningkatan pengelolaan pasar	
3	Peningkatan akses jalur pemasaran dan distribusi barang dan jasa	3. 1	Persaingan Usaha dan Perlindungan Konsumen	3.1.1	Peningkatan Perlindungan konsumen	
		3. 2	Pengendalian Distribusi Barang dan Jasa	3.2.1	Pengendalian distribusi barang dan jasa	
II	BIDANG PERTANIAN					
1	Peningkatan produksi pertanian dalam arti luas, yang memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif serta berorientasi pada pasar	1. 1	Peningkatan Ketahanan Pangan	1.1.1	Pembinaan dan pengembangan usaha peternakan rakyat	
				1.1.2	Peningkatan produksi pangan dan hortikultura	

Matriks Daftar Indikasi Program dan Daerah

MISI III : Memberdayakan masyarakat dan seluruh kekuatan ekonomi daerah dengan memperkuat struktur perekonomian berbasis kerakyatan yang bertumpu pada agribisnis dan agroindustri

ARAH KEBIJAKAN		PROGRAM		KEGIATAN		KET
5		6		7		8
2	Optimalisasi pemanfaatan hutan sesuai fungsi produksi, ekologis dan sosial ekonominya	2.4	Pengembangan Agribisnis	1.1.3	Peningkatan penyuluhan pertanian tanaman pangan dan hortikultura	
				1.1.4	Pembinaan dan pengembangan pertanian terpadu di desa miskin	
				1.1.5	Pembinaan dan pengembangan perkebunan rakyat	
				1.1.6	Pembinaan peningkatan dan pengembangan usaha ternak besar	
				1.1.7	Pengembangan pemberdayaan ekonomi kerakyatan ternak kecil dan ternak unggas	
				2.4.1	Pengembangan agribisnis tanaman pangan dan hortikultura	
				2.4.2	Pengembangan agribisnis tanaman perkebunan	
		2.4.3	Pengembangan agribisnis peternakan			
		2.4.4	Pengembangan agribisnis perikanan			
		2.1	Pembangunan dan Pembinaan Kehutanan	3.1.1	Penataan dan pengamatan kawasan hutan	
2.2	Pembangunan Usaha Perhutanan Rakyat	2.2.1	Reboisasi dan rehabilitasi hutan dan lahan kritis			

MATRIKS DAFTAR INDIKASI PROGRAM DAN DAERAH

MISI III : Memberdayakan masyarakat dan seluruh kekuatan ekonomi daerah dengan memperkuat struktur perekonomian berbasis kerakyatan yang bertumpu pada agrobisnis dan agroindustri

ARAH KEBIJAKAN		PROGRAM		KEGIATAN		KET
5		6		7		8
III	BIDANG KOPERASI DAN UKM	2. 3	Pengembangan Sumber Daya Perikanan	2.2.2 2.3.1	Pengembangan dan pemberdayaan hutan rakyat Pembinaan dan pengembangan perikanan rakyat	
1	Pembinaan dan pengembangan usaha kecil, menengah dan koperasi melalui peningkatan kemampuan manajemen dan wirausaha serta penguatan modal	1. 1	Pengembangan Kewirausahaan dan Daya Saing PKMK	1.1.1 1.1.2	Pemberdayaan koperasi dan UKM Penguatan modal koperasi dan UKM	
B. BIDANG KEWENANGAN LAIN						
I.	BIDANG KEUANGAN DAERAH					
1	Penggalian potensi penerimaan asli daerah yang berkesinambungan guna mendukung kelancaran pembangunan	1. 1	Peningkatan Penerimaan Daerah	1.1.1	Peningkatan penerimaan keuangan daerah	
2	Mendorong terciptanya iklim investasi yang kondusif di Kabupaten Siak		Pembinaan dan Pengembangan Usaha Daerah		Pengembangan promosi investasi Inventarisasi potensi PAD Pengembangan Usaha Daerah dan Penyertaan Modal Daerah	

Matriks Daftar Indikasi Program dan Daerah

MISI III : Memberdayakan masyarakat dan seluruh kekuatan ekonomi daerah dengan memperkuat struktur perekonomian berbasis kerakyatan yang bertumpu pada agrobisnis dan agroindustri

ARAH KEBIJAKAN		PROGRAM		KEGIATAN		KET
5		6		7		8
II	BIDANG PERTAMBANGAN DAN ENERGI					
1	Pemanfaatan sumberdaya tambang dan energi secara efisien untuk menjamin pembangunan yang berkelanjutan	1. 1	pengembangan tenaga listrik	1.1.1	Pembinaan dan pengembangan usaha peternakan rakyat	
		1. 2	Pengembangan Listrik Pedesaan	1.2.1	Pengembangan dan peningkatan pelayanan listrik pedesaan	
		1. 3	Pemanfaatan Sumber Daya Mineral	1.3.1	Inventarisasi potensi sumber daya mineral	
III	BIDANG PARIWISATA DAN TELEKOMUNIKASI					
1	Optimalisasi potensi wisata unggulan asli daerah	1. 1	Pemasaran Pariwisata	1.1.1	Peningkatan promosi pariwisata	
2	Pengembangan pendukung sarana dan prasarana pariwisata	2. 1	Pengembangan Produk Pariwisata	2.1.1	Pengembangan obyek wisata	
				2.1.2	Perencanaan dan penataan pariwisata	
				2.1.3	Pengembangan sarana dan prasarana obyek wisata	
3	Pengembangan sarana dan prasarana telekomunikasi	3. 1	Pengembangan sarana dan prasarana telekomunikasi	3.1.1	Pengembangan sarana dan prasarana telekomunikasi	

MATRIKS DAFTAR INDIKASI PROGRAM DAN DAERAH

MISI IV : Mengembangkan dan meningkatkan infrastruktur daerah yang mendukung peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan daerah yang berkelanjutan

	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	KEGIATAN	KETERANGAN
	5	6	7	8
	A. BIDANG KEWENANGAN WAJIB			
I	BIDANG PEKERJAAN UMUM- SUMBER DAYA AIR			
1	Penataan dan pengamanan sempadan sungai tebing sungai dan alur sungai	1.1 Pengendalian Banjir dan Konservasi Sumber-Sumber Air	1.1.1 Perbaikan dan pengamanan sungai	
			1.1.2 Perbaikan dan normalisasi sungai	
2	Optimalisasi pemanfaatan daerah rawa dan pengembangan jaringan pengairan	2.1 Pengembangan Jaringan Irigasi dan Reklamasi Rawa	2.1.1 Pengembangan dan pembangunan daerah pengairan	
			2.1.2 Operasi dan pemeliharaan jaringan pengairan	
3	Menjamin ketersediaan air baku bagi kebutuhan air bersih masyarakat	3.1 Pengusahaan Sumber-Sumber Air dan Penyediaan Air Baku	3.1.1 Penyediaan dan pengelolaan air baku	
II	BIDANG PEKERJAAN UMUM - PERHUBUNGAN			
1	Pembangunan, peningkatan serta pemeliharaan sarana dan prasarana perhubungan untuk memperlancar mobilitas orang dan barang	1.1 Rehabilitasi Transportasi Jalan	1.1.1 Pemeliharaan jalan dan jembatan	

MATRIKS DAFTAR INDIKASI PROGRAM DAN DAERAH

MISI IV : Mengembangkan dan meningkatkan infrastruktur daerah yang mendukung peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan daerah yang berkelanjutan

ARAH KEBIJAKAN		PROGRAM		KEGIATAN		KET
5		6		7		8
		1. 2	Peningkatan / Pembangunan Transportasi Jalan	1.2.1	Pembangunan jalan	
				1.2.2	Peningkatan jalan	
				1.2.3	Pembangunan dan penggantian jembatan	
				1.2.4	Perencanaan dan pengawasan teknis jalan dan jembatan (P3-JT)	
		1. 3	Pengembangan Aksesibilitas Prasarana Jalan	1.3.1	Peningkatan dan pengadaan fasilitas peralatan Pekerjaan Umum	
		1. 4	Pengembangan Lalu Lintas Angkutan Jalan	1.4.1	Pengembangan sarana dan prasarana keselamatan lalu lintas	
				1.4.2	Pembinaan dan pengawasan lalu lintas jalan	
				1.4.3	Peningkatan fasilitas pengujian kendaraan bermotor	
		1. 5	Peningkatan dan Pembangunan Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan	1.5.1	Peningkatan fasilitas angkutan sungai	
		1. 6	Peningkatan / Pembangunan Fasilitas Pelabuhan	1.6.1	Pembangunan fasilitas kepelabuhan	
				1.6.2	Penyediaan fasilitas SAR daerah	

Matriks Daftar Indikasi Program dan Daerah

MISI IV : Mengembangkan dan meningkatkan infrastruktur daerah yang mendukung peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan daerah yang berkelanjutan

ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	KEGIATAN	KET
5	6	7	8
III	BIDANG PEKERJAAN UMUM – PERUMAHAN PEMUKIMAN		
1	<p>Perbaiki perumahan dan pemukiman, serta penyehatan lingkungan pemukiman yang layak bagi masyarakat</p>	<p>1. Pengembangan Prasarana dan Sarana Pemukiman</p> <p>1.1.1 Perbaiki perumahan dan pemukiman (P2P) Pedesaan</p> <p>1.1.2 Penyehatan lingkungan pemukiman (PLP) Pedesaan</p> <p>1.1.3 Penyediaan dan pengelolaan sarana air bersih (PPAB) Pedesaan</p> <p>1.2.1 Perbaiki perumahan dan pemukiman (P2P) Perkotaan</p> <p>1.2.2 Penyehatan lingkungan pemukiman (PLP) Perkotaan</p> <p>1.2.3 Penyediaan dan pengelolaan air bersih (PPAB) Perkotaan</p> <p>1.2.4 Pengembangan sarana perkotaan</p> <p>1.2.5 Pengelolaan kebersihan dan taman kota</p> <p>1.3.1 Penyediaan perumahan bagi masyarakat</p>	

Matriks Daftar Indikasi Program dan Daerah

MISI IV : Mengembangkan dan meningkatkan infrastruktur daerah yang mendukung peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan daerah yang berkelanjutan

ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	KEGIATAN	KET
5	6	7	8
IV	BIDANG LINGKUNGAN HIDUP DAN TATA RUANG		
1	Pemanfaatan SDA secara bertanggung jawab guna mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan	1. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan, Konservasi, dan Rehabilitasi SDA 1. Pencegahan Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan Hidup	1.1.1 Pengelolaan lingkungan hidup 1.2.1 Pengendalian pencemaran lingkungan hidup
2	Penataan ruang untuk menjamin pemanfaatan ruang yang terkendali, serta tertib sistem pertanahan yang meliputi tertib penguasaan, penggunaan, pemilikan dan pengalihan hak atas tanah	2. Penataan Ruang 1 2. Pengelolaan Pertanahan 2	2.1.1 Penataan Ruang Kabupaten Siak 2.2.1 Peningkatan pengelolaan dan penataan pertanahan
B. BIDANG KEWENANGAN LAIN			
I.	PEMBANGUNAN DAERAH		
1	Pengembangan dan pemberdayaan masyarakat	1. Pemberdayaan Masyarakat 1	1.1.1 Pembinaan pemberdayaan masyarakat pedesaan 1.1.2 Perencanaan dan pengembangan ekonomi kerakyatan
2	Pengembangan wilayah pusat-pusat pertumbuhan	2. Pengembangan Wilayah 1	2.1.1 Peningkatan Pemberdayaan Kecamatan dan Desa (PPPKD) 2.1.2 Pemekaran wilayah Kecamatan, desa dan kelurahan

MATRIKS DAFTAR INDIKASI PROGRAM DAN DAERAH

MISI IV : Mengembangkan dan meningkatkan infrastruktur daerah yang mendukung peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan daerah yang berkelanjutan

ARAH KEBIJAKAN		PROGRAM		KEGIATAN		KETERANGAN
5		6		7		8
3	Pemantapan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah	3.1	Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah	3.1.1	Penyusunan Perencanaan Umum dan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah	
				3.1.2	Perencanaan dan Pengendalian Bidang Perencanaan Ekonomi dan Keuangan	
				3.1.3	Perencanaan dan Pengendalian Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	
				3.1.4	Perencanaan dan Pengendalian Bidang Perencanaan Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Sosial	
				3.1.5	Evaluasi Hasil-Hasil Pembangunan Daerah	

BAB IX PENUTUP

Perubahan paradigma pembangunan nasional dari kebijakan dan wewenang yang dikendalikan secara terpusat (sentralisasi) ke pemberian wewenang kepada daerah kabupaten dan kota untuk mengendalikan kegiatan pembangunan secara otonomi (desentralisasi), telah memberikan harapan yang besar bagi setiap daerah kabupaten dan kota untuk tumbuh dan berkembang dengan cepat, dengan tetap memperhatikan aspek persatuan dan kesatuan bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Untuk memenuhi tuntutan dan harapan pembangunan tersebut, Pemerintah Kabupaten Siak telah berupaya semaksimal mungkin untuk melaksanakan pembangunan, dengan memanfaatkan segenap potensi yang ada di daerah. Salah satu wujud dari upaya dimaksud adalah dengan menyusun Rencana Strategis Kabupaten Siak tahun 2002 – 2006.

Pada dasarnya, Rencana Strategis Kabupaten Siak merupakan dokumen perencanaan taktis strategis yang menjabarkan potret permasalahan pembangunan daerah serta indikasi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk memecahkan permasalahan dimaksud secara terencana dan bertahap melalui sumber pembiayaan APBD, dengan mengutamakan kewenangan wajib disusul kewenangan lainnya sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah.

Rencana Strategis Kabupaten Siak Tahun 2002 - 2006 berkedudukan dan berfungsi antara lain merupakan alat bantu yang terukur bagi rujukan penilaian kinerja Kepala Daerah (Bupati Siak) pada setiap akhir tahun anggaran dan akhir masa jabatan oleh DPRD Kabupaten Siak dengan menggunakan sedapat mungkin lima tolok ukur, yaitu masukan (Inputs), keluaran (Outputs), hasil (outcomes), manfaat (benefits) dan dampak (impacts). Oleh karenanya rencana strategis ini merupakan hasil kesepakatan antara Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Siak sebagai wakil segenap unsur masyarakat, yang dituangkan dalam Peraturan Daerah.

Sukses tidaknya kegiatan penyusunan Rencana Strategis Kabupaten Siak Tahun 2002 – 2006 ini tidak terlepas dari partisipasi dan dukungan berbagai pihak baik dalam memberikan informasi (data) maupun berupa sumbangan pemikiran (*sharing* pendapat).

Agar rencana strategis yang telah disusun ini dapat mendatangkan manfaat bagi pembangunan Kabupaten Siak ke depan, maka dalam implementasinya perlu adanya komitmen, semangat, tekad, kemauan, kemampuan dan etos kerja yang tinggi, yang ditunjukkan melalui kesungguhan, kejujuran dan keterbukaan tidak hanya oleh segenap aparatur Pemerintah Daerah saja, melainkan juga oleh DPRD Kabupaten Siak dan berbagai *stakeholder* yang ada di Kabupaten Siak.

Dalam operasionalisasinya, setiap instansi yang ada di Kabupaten Siak harus menjabarkan kembali Rencana Strategis yang telah disusun untuk skala kabupaten ini ke dalam Renstra Dinas atau unit kerja, dengan menggunakan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 sebagai rujukannya agar dapat dioperasionalkan berdasarkan kompetensi dan kapasitas masing-masing serta untuk menjamin adanya konsistensi.

Rencana Strategis ini merupakan proses yang berkelanjutan, oleh karena itu agar mampu dan responsif terhadap perkembangan situasi yang sangat dinamis, baik dalam aspek kenegaraan, politik, ekonomi, maupun sosial budaya, maka secara periodik perlu diupayakan untuk dilakukan revisi baik secara parsial maupun menyeluruh.